



DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN  
KEMENTERIAN PERTANIAN

# LAPORAN KINERJA

SEKRETARIAT  
DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN

**2022**



# LAPORAN KINERJA 2022

SEKRETARIAT  
DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN



DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN  
KEMENTERIAN PERTANIAN



# KATA PENGANTAR

**Heru Tri Widarto, S.Si, M.Sc**

*Sekretaris Direktorat Jenderal Perkebunan*



Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan sebagai salah satu unit eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Perkebunan berkewajiban untuk menyusun laporan kinerja (LAKIN) sebagai bentuk keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja dan pelaksanaan program/kegiatan. Penyusunan LAKIN Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini merupakan Laporan Kinerja tahun ketiga dari periode Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan 2020-2024. Laporan ini diharapkan dapat memberikan penjelasan lengkap tentang capaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2022. Lebih lanjut, laporan kinerja ini dapat berfungsi sebagai alat pengendali serta penilai kinerja secara kuantitatif dan diharapkan dapat tercipta transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan yang bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkebunan. Dalam laporan kinerja ini juga menyertakan berbagai upaya perbaikan berkesinambungan yang telah dilakukan dalam lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan, untuk meningkatkan kinerjanya pada masa mendatang.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat dalam perbaikan birokrasi dan sebagai bentuk pertanggungjawaban kami kepada masyarakat atas mandat yang diemban dan kinerja yang telah ditetapkan.

Sekretaris Direktorat Jenderal Perkebunan,



*Heru Tri Widarto*  
Heru Tri Widarto, S.Si, M.Sc

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam rangka mewujudkan visi misi Direktorat Jenderal Perkebunan, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan memiliki peran dalam memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkebunan. Dalam mewujudkan visi dan misi organisasi, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2020-2024. Renstra tersebut memuat empat tujuan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan, yaitu 1) Mewujudkan birokrasi Direktorat Jenderal Perkebunan yang efektif dan efisien; 2) Terselenggaranya pengelolaan anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan yang akuntabel dan berkualitas; 3) Mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Perkebunan; dan 4) Meningkatkan kualitas layanan dan informasi publik Direktorat Jenderal Perkebunan.

Untuk mencapai visi dan misi serta tujuan yang telah ditetapkan, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan menjabarkan sasaran-sasaran kegiatan sebagai rincian atas tujuan tersebut. Sasaran-sasaran dimaksud telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Sekretaris Direktorat Jenderal Perkebunan, serta seterusnya diturunkan hingga level pegawai. Sasaran kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan adalah 1) Terwujudnya Birokrasi Direktorat Jenderal

Perkebunan yang Efektif dan Efisien dan 2) Terkelolanya Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan yang Akuntabel dan Berkualitas.

Dengan berakhirnya pelaksanaan kinerja dan anggaran tahun 2022, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan diwajibkan menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) sesuai dengan amanah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan pada tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021. Pada tahun 2022 Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan telah menetapkan 6 (enam) Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2022. Adapun dari keenam Indikator tersebut, dapat diketahui bahwa pencapaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan sangatlah baik. Hal ini ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian target seluruh indikator Tahun 2022. Dengan kata lain, seluruh capaian Indikator berada dalam status hijau atau berhasil memenuhi target. Capaian indikator kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan yaitu Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Perkebunan sebesar 35,00 (target 32,72); Tingkat Kepuasan unit Eselon II lingkup Ditjen Perkebunan terhadap layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan yang diberikan sebesar 3,13 (target 3,00); Level maturitas penyelenggaraan SPIP Ditjen

Perkebunan sebesar 3,774 (target 3,00); Persentase rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian terkait Ditjen Perkebunan yang ditindaklanjuti Ditjen Perkebunan sebesar 87,50% (target 80,00%); Persentase rekomendasi hasil audit yang ditindaklanjuti Ditjen Perkebunan terhadap total rekomendasi hasil audit yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal sebesar 86,36% (target 85,00%) dan Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan yaitu 91,04 (target 85,00).

Pada sisi pengelolaan anggaran, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan telah merealisasikan anggaran untuk semua jenis belanja sebesar 95,81%, yaitu Rp 231,2 M dari total pagu sebesar Rp 241,3 M. Kualitas pemanfaatan anggaran tidak direfleksikan dengan sekedar menyerap pagu anggaran, tetapi memperhitungkan juga ketercapaian output, konsistensi dengan perencanaan, serta upaya efisiensi dalam penyerapannya. Selain itu, pemanfaatan anggaran yang

berkualitas harus memberikan dampak yang dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat luas.

Meskipun capaian seluruh IKU Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2022 telah memenuhi target yang ditetapkan, keberhasilan tersebut kiranya dapat dipertahankan dan ditingkatkan pada tahun-tahun selanjutnya. Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan terus berkomitmen untuk melakukan perbaikan manajemen, dan meningkatkan akuntabilitas kinerja guna meningkatkan pelayanan publik dan kepercayaan publik. Hal ini dicerminkan dengan upaya perbaikan tata kelola organisasi dan sumber daya manusia melalui pelaksanaan program reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan, penguatan pendampingan program dan anggaran secara berkala di lingkup Ditjen Perkebunan, dan koordinasi lintas program yang perlu ditingkatkan dalam penyelenggaraan kegiatan yang mendukung capaian indikator kinerja.

# DAFTAR ISI

<b>I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
LATAR BELAKANG .....	1
TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI .....	2
SISTEMATIKA LAPORAN .....	5
<b>II. PERENCANAAN KINERJA.....</b>	<b>9</b>
RENCANA STRATEGIS.....	9
PERJANJIAN KINERJA .....	10
<b>III. AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>17</b>
CAPAIAN KINERJA.....	17
REALISASI ANGGARAN .....	43
<b>IV. PENUTUP .....</b>	<b>51</b>
KESIMPULAN .....	51
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>53</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 2.1</b>	Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2022.....	11
<b>Tabel 2.2</b>	Rekapitulasi Alokasi Anggaran Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Tahun 2022.....	12
<b>Tabel 2.3</b>	Perbandingan Indikator Kinerja Tahun 2018, 2019, 2020, 2021, dan 2022 .....	13
<b>Tabel 2.4</b>	Sasaran Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2020 - 2024.....	14
<b>Tabel 3.1</b>	Capaian Indikator Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2022.....	17
<b>Tabel 3.2</b>	Capaian Sasaran Terwujudnya Birokrasi Direktorat Jenderal Perkebunan yang Efektif dan Efisien .....	19
<b>Tabel 3.3</b>	Rincian Hasil Evaluasi Komponen Penilaian PMPRB .....	19-20
<b>Tabel 3.4</b>	Capaian IKU Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Perkebunan .....	20
<b>Tabel 3.5</b>	Capaian Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2020 - 2022.....	20
<b>Tabel 3.6</b>	Capaian Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Perkebunan dibandingkan Target Renstra .....	21
<b>Tabel 3.7</b>	Demografi Survei Kepuasan Layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2022.....	23
<b>Tabel 3.8</b>	Capaian IKU Tingkat Kepuasan unit Eselon II lingkup Ditjen Perkebunan terhadap layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan yang diberikan...	24
<b>Tabel 3.9</b>	Hasil Survei Kepuasan Layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2022.....	24-26
<b>Tabel 3.10</b>	Capaian Tingkat Kepuasan unit Eselon II lingkup Ditjen Perkebunan terhadap layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan yang diberikan Tahun 2018 - 2022.....	26
<b>Tabel 3.11</b>	Capaian Tingkat Kepuasan unit Eselon II lingkup Ditjen Perkebunan terhadap layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan yang diberikan dibandingkan Target Renstra .....	27
<b>Tabel 3.12</b>	Capaian IKU Level Maturitas Penyelenggaraan SPIP Ditjen Perkebunan.....	30

<b>Tabel 3.13</b>	Nilai Unsur Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP.....	30-32
<b>Tabel 3.14</b>	Skor Komponen Penilaian Maturitas SPIP .....	32
<b>Tabel 3.15</b>	Capaian Level Maturitas Penyelenggaraan SPIP Ditjen Perkebunan Tahun 2021 - 2022.....	32
<b>Tabel 3.16</b>	Capaian Level Maturitas Penyelenggaraan SPIP Ditjen Perkebunan dibandingkan Target Renstra .....	33
<b>Tabel 3.17</b>	Capaian IKU Persentase rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian terkait Ditjen Perkebunan yang ditindaklanjuti Ditjen Perkebunan.....	34
<b>Tabel 3.18</b>	Capaian Persentase rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian terkait Ditjen Perkebunan yang ditindaklanjuti Ditjen Perkebunan Tahun 2018 - 2022 .....	35
<b>Tabel 3.19</b>	Capaian Persentase rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian terkait Ditjen Perkebunan yang ditindaklanjuti Ditjen Perkebunan dibandingkan Target Renstra.....	35
<b>Tabel 3.20</b>	Capaian IKU Persentase rekomendasi hasil audit yang ditindaklanjuti Ditjen Perkebunan terhadap total rekomendasi hasil audit yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal.....	36
<b>Tabel 3.21</b>	Capaian Persentase rekomendasi hasil audit yang ditindaklanjuti Ditjen Perkebunan terhadap total rekomendasi hasil audit yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal Tahun 2018 - 2022.....	37
<b>Tabel 3.22</b>	Capaian Persentase rekomendasi hasil audit yang ditindaklanjuti Ditjen Perkebunan terhadap total rekomendasi hasil audit yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal dibandingkan dengan Target Renstra .....	37
<b>Tabel 3.23</b>	Efisiensi Penggunaan Anggaran untuk Mendukung Sasaran Terwujudnya Birokrasi Direktorat Jenderal Perkebunan yang Efektif dan Efisien.....	38
<b>Tabel 3.24</b>	Capaian Sasaran Terkelolanya Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan yang Akuntabel dan Berkualitas .....	39
<b>Tabel 3.25</b>	Capaian IKU Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan.....	40
<b>Tabel 3.26</b>	Capaian Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2018 - 2022.....	40
<b>Tabel 3.27</b>	Capaian Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan dibandingkan dengan Target Renstra.....	41

<b>Tabel 3.28</b>	Efisiensi Penggunaan Anggaran untuk Mendukung Sasaran Terkelolanya Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan yang Akuntabel dan Berkualitas .....	43
<b>Tabel 3.29</b>	Realisasi Anggaran Tahun 2018-2022 per Jenis Belanja .....	45
<b>Tabel 3.30</b>	Realisasi Anggaran Tahun 2022 per Rincian Output.....	47

# DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1.1</b>	Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan .....	3
<b>Gambar 1.2</b>	Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan .....	4
<b>Gambar 1.3</b>	Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan.....	5
<b>Gambar 3.1</b>	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan .....	40
<b>Gambar 3.2</b>	Perkembangan Pagu dan Realisasi Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan.....	44
<b>Gambar 3.3</b>	Tren Persentase Realisasi Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan.....	44
<b>Gambar 3.4</b>	Tren Persentase Realisasi Belanja Modal.....	46
<b>Gambar 3.5</b>	Tren Persentase Realisasi Belanja Pegawai .....	46
<b>Gambar 3.6</b>	Tren Persentase Realisasi Belanja Barang .....	46



# I. PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR

ORGANISASI

SISTEMATIKA LAPORAN



# I. PENDAHULUAN

## LATAR BELAKANG

Pembangunan perkebunan sebagai bagian integral dari pembangunan pertanian dan pembangunan nasional, merupakan salah satu potensi strategis dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Oleh karenanya pengelolaannya harus diselaraskan dengan upaya pengelolaan sumberdaya alam dan pemeliharaan daya dukungnya agar bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dari generasi ke generasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 bahwa penyelenggaraan perkebunan antara lain memiliki sasaran: (1) meningkatkan pendapatan masyarakat; (2) meningkatkan penerimaan negara dan devisa negara; (3) menyediakan lapangan kerja; (4) meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan daya saing; (5) memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri dalam negeri; dan (6) mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya alam secara berkelanjutan.

Penyelenggaraan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi, peningkatan nilai tambah, penguatan daya saing, dan pemasaran komoditas perkebunan, serta pembinaan usaha perkebunan berkelanjutan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian. Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan sebagai salah satu unit eselon II Direktorat Jenderal Perkebunan,

sebagaimana diamanatkan dalam Permentan Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkebunan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan senantiasa melakukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung dengan efektif, efisien sesuai prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Salah satu asas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam UU Nomor 28 Tahun 1999 adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN). LAKIN Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2022 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban sekaligus memberikan

gambaran capaian Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2022 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan, sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit di lingkungan Direktorat Jenderal Perkebunan, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan dari *stakeholders* demi perbaikan kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, LAKIN juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

## TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai dengan Permentan Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan adalah organisasi eselon II di bawah Direktorat Jenderal Perkebunan yang mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkebunan. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan menyelenggarakan fungsi:

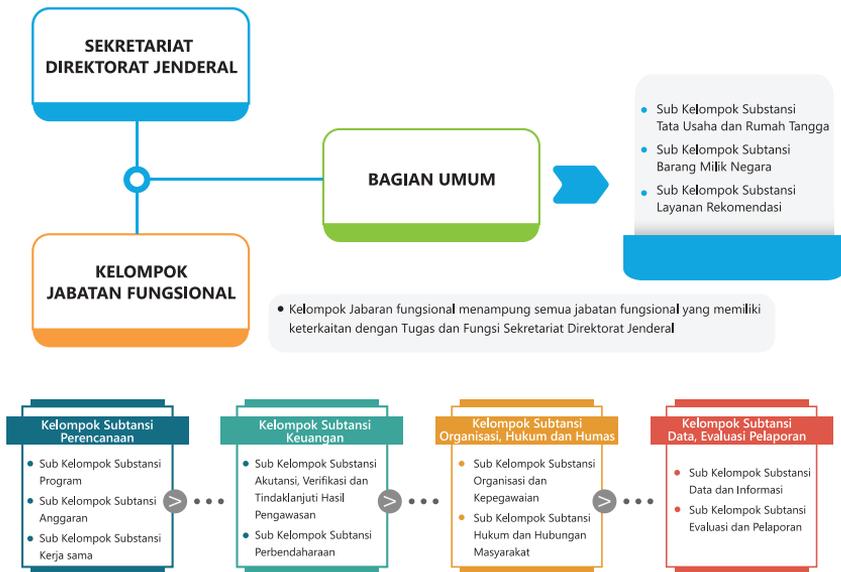
- a. koordinasi, penyusunan rencana dan program, anggaran, serta kerja sama di bidang perkebunan;

- b. pengelolaan urusan keuangan dan penatausahaan barang milik negara;
- c. evaluasi dan penyempurnaan organisasi, tata laksana, pengelolaan urusan kepegawaian, dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, dan pelaksanaan hubungan masyarakat serta informasi publik;
- d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan, serta pemberian layanan rekomendasi di bidang perkebunan;
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Jenderal Perkebunan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal Perkebunan.

Berdasarkan perumusan fungsi tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan telah membentuk kelompok-kelompok jabatan fungsional yang disusun sesuai dengan tuntutan reformasi birokrasi yang berbasis pada pelayanan yang efisien, efektif, dan terfokus. Struktur organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan dapat ditunjukkan pada Gambar 1.1.

Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan terdiri dari 1 bagian umum yang dikelapai oleh seorang Kepala Bagian dan 4 kelompok substansi, yang setiap kelompok dikepalai oleh seorang Koordinator, dengan rincian tugas dan fungsi sesuai Permentan Nomor 8 Tahun 2021 sebagai berikut:

- a. Bagian Umum, dalam menjalankan tugasnya, Bagian Umum dibagi menjadi tiga Sub Kelompok yaitu:
  - Sub Kelompok Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

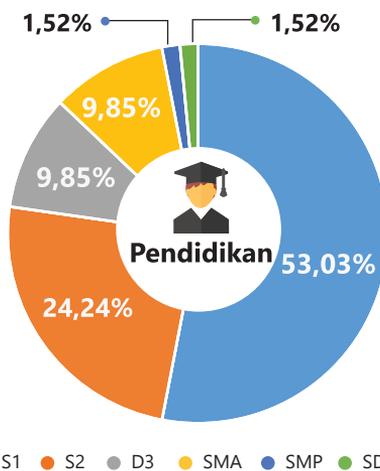


**Gambar 1.1** Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan

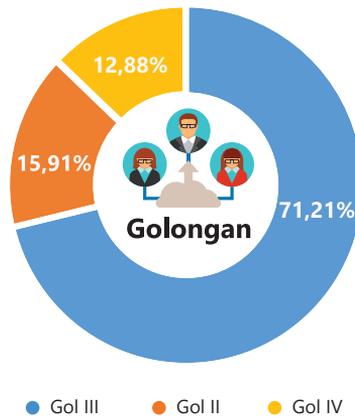
- Sub Kelompok Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan barang milik negara.
  - Sub Kelompok Layanan Rekomendasi mempunyai tugas melakukan pemberian layanan rekomendasi di bidang perkebunan.
- b. Kelompok Perencanaan mempunyai tugas melakukan melakukan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran serta kerja sama di bidang perkebunan. Dalam menjalankan tugasnya, Kelompok Perencanaan dibagi menjadi tiga Sub Kelompok yaitu:
- Sub Kelompok Program mempunyai tugas melakukan penyediaan bahan koordinasi dan penyusunan rencana dan program di bidang perkebunan.
  - Sub Kelompok Anggaran mempunyai tugas melakukan penyediaan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran di bidang perkebunan.
- c. Kelompok Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan, penerimaan negara bukan pajak, penyediaan pengujian dan penerbitan surat perintah membayar, urusan akuntansi dan verifikasi keuangan, serta tindak lanjut hasil pengawasan. Dalam menjalankan tugasnya, Kelompok Keuangan dibagi menjadi dua Sub Kelompok yaitu:
- Sub Kelompok Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan, penerimaan negara bukan pajak, dan penyediaan bahan pengujian surat perintah membayar.
  - Sub Kelompok Akuntansi, Verifikasi, dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan mempunyai tugas melakukan penyediaan bahan penyusunan kerja sama di bidang perkebunan.

mempunyai tugas melakukan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan serta tindak lanjut hasil pengawasan.

- d. Kelompok Organisasi, Kepegawaian, Hukum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan evaluasi organisasi, tata laksana, reformasi birokrasi, urusan kepegawaian, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik. Kelompok Organisasi, Kepegawaian, Hukum dan Hubungan Masyarakat dibagi menjadi dua Sub Kelompok yaitu:
  - Sub Kelompok Organisasi dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan persiapan bahan evaluasi organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi serta pelaksanaan urusan kepegawaian.
  - Sub Kelompok Hukum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan persiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, rancangan perjanjian, pemberian pertimbangan dan bantuan hukum, dan pelaksanaan hubungan masyarakat serta informasi publik dan urusan perpustakaan.
- e. Kelompok Data, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi, analisis, penyiapan pemantauan dan evaluasi laporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perkebunan. Dalam menjalankan tugasnya, Kelompok Data, Evaluasi dan Pelaporan dibagi menjadi dua Sub Kelompok substansi yaitu:
  - Sub Kelompok Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi di bidang perkebunan.
  - Sub Kelompok Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan analisis, penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi serta laporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perkebunan.



Gambar 1.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan



**Gambar 1.3** Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan

Perubahan struktur organisasi tanpa didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) memadai tidak akan membawa Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan ke arah pencapaian misi yang dicita-citakan. Oleh karena itu, diperlukan perhatian khusus dalam pengelolaan SDM serta peningkatan kualitas dan kompetensi yang dibutuhkan. Pengelolaan SDM ditujukan kepada terwujudnya SDM yang berkomitmen pada integritas, moralitas, profesionalitas, dan kesejahteraan. Secara umum, jumlah pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan per 31 Desember 2022 adalah 132 pegawai dengan perbandingan pegawai perempuan dan laki-laki yaitu 70 orang (53,03%) dan 62 orang (46,97%). Adapun gambaran SDM di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan sampai dengan tanggal akhir periode tahun 2022 dapat dijelaskan ke dalam beberapa klasifikasi yaitu berdasarkan tingkat pendidikan dan golongan.

Komposisi pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan menurut tingkat Pendidikan terakhirnya (Gambar 1.2), menunjukkan sebagian besar atau 53,03% pegawai memiliki pendidikan terakhir strata 1

(S1) dan pegawai dengan pendidikan terakhir S2 sebesar 24,24% dan sisanya pegawai dengan pendidikan D3 (9,85%), SMA (9,85%), SMP (1,52%) dan SD (1,52%).

Gambaran pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan berdasarkan golongan seperti tampak pada Gambar 1.3, menunjukkan bahwa hampir sebagian besar atau sebanyak 71,21% dari seluruh jumlah pegawai adalah pegawai dengan golongan III, dan sebanyak 15,91% pegawai dengan golongan II dan sisanya sebanyak 12,88% adalah pegawai dengan golongan IV.

## SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- 1) Bab I Pendahuluan  
Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi pada tahun 2022.
- 2) Bab II Perencanaan Kinerja  
Pada bab ini diuraikan penjelasan

mengenai rencana strategis, dilanjutkan dengan penjelasan perjanjian kinerja tahun 2022.

3) Bab III Akuntabilitas Kinerja

a) Capaian Kinerja Organisasi

Pada subbab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi selama tahun 2022.

b) Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran tahun 2022 yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2022.

4) Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi, upaya perbaikan, dan rekomendasi yang telah ditindaklanjuti oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan untuk meningkatkan kinerjanya.

5) Lampiran

Lampiran LAKIN Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2022 meliputi Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2022, data dukung untuk menunjang hasil pengukuran IKU, dan dokumentasi kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2022.



## **II. PERENCANAAN KINERJA**

RENCANA STRATEGIS  
PERJANJIAN KINERJA



## II. PERENCANAAN KINERJA

### PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan unit organisasi sebagai bentuk penjabaran tugas pokok dan fungsi dari organisasi. Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan disusun untuk jangka menengah (periode lima tahun). Dalam menyusun Laporan Kinerja Tahun 2022, Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2020-2024 disusun sebagai panduan dan pedoman dalam merumuskan perencanaan kegiatan. Penyusunan Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan 2020-2024 mengacu pada dokumen-dokumen perencanaan di level Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian dan Nasional, meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024, dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2020-2024.

Melalui identifikasi berbagai potensi dan tantangan yang telah dan akan dihadapi organisasi di masa mendatang, telah disusun visi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan. Visi tersebut disusun untuk memberi arah yang akan ditempuh oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan dan dapat menggambarkan organisasi secara utuh mencakup seluruh fungsi yang ada dan dapat diterjemahkan dan dipahami oleh

seluruh elemen dengan mudah sehingga mampu direalisasikan dengan baik menuju peningkatan kualitas pelayanan publik dan *good governance*.

Dalam rangka mendukung visi Direktorat Jenderal Perkebunan **“Perkebunan Indonesia yang produktif, bernilai tambah dan berdaya saing dalam mewujudkan pertanian Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong untuk mendukung tercapainya visi Presiden Republik Indonesia”**, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan telah menetapkan visi, yaitu: **“Profesional dalam mewujudkan pelayanan prima dan berkualitas di bidang manajemen dan kesekretariatan untuk mendukung perkebunan yang produktif, bernilai tambah dan berdaya saing”**.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan menjalankan misi yang sejalan dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perkebunan yaitu:

- (1) Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan menyusun rencana program, anggaran dan kerjasama di bidang perkebunan;
- (2) Melaksanakan urusan perbendaharaan, penerimaan negara bukan pajak, penyiapan pengujian dan penerbitan surat perintah membayar, akuntansi

dan verifikasi keuangan serta tindak lanjut hasil pengawasan dan urusan perlengkapan;

- (3) Melaksanakan penyiapan evaluasi dan penyusunan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi serta urusan kepegawaian, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, litigasi hukum, hubungan masyarakat dan informasi publik, urusan perpustakaan serta urusan tata usaha dan rumah tangga;
- (4) Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi, analisis, penyiapan pemantauan dan evaluasi serta laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta pemberian layanan rekomendasi bidang perkebunan;
- (5) Melaksanakan pelayanan dan pembinaan kegiatan manajemen dan teknis lainnya Ditjen. Perkebunan di pusat dan daerah serta pengelolaan urusan administrasi perkantoran.

Sebagai bagian dalam melakukan penyempurnaan proses bisnis dan kualitas layanan, Direktorat Jenderal Perkebunan melakukan penajaman fungsi-fungsi yang menjadi domain dan tanggungjawabnya secara berkelanjutan. Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan menopang fungsi tersebut dengan semangat reformasi birokrasi untuk senantiasa melakukan penyempurnaan organisasi, tata kelola keorganisasian, dan manajemen SDM yang bentuk dan kebijakannya senantiasa disesuaikan dengan perubahan dan kebutuhan organisasi dan para pemangku kepentingan. Alat bantu proses pengelolaan kinerja berbasis *balance scorecard* dalam memetakan strategi, target,

dan penilaian pencapaian kinerja telah diimplementasikan.

Di samping itu, dalam rangka mewujudkan visi dan misi Direktorat Jenderal Perkebunan dan untuk mendukung visi dan misi Kementerian Pertanian, ditetapkan tujuan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2020-2024, yaitu:

- (1) Mewujudkan birokrasi Direktorat Jenderal Perkebunan yang efektif dan efisien;
- (2) Terselenggaranya pengelolaan anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan yang akuntabel dan berkualitas;
- (3) Mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Perkebunan;
- (4) Meningkatkan kualitas layanan dan informasi publik Direktorat Jenderal Perkebunan;

## PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah, untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator dan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki. Perjanjian Kinerja berpedoman pada visi dan misi, Renstra, Renja dan peraturan terkait pengelolaan kinerja. Indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan menjadi kesepakatan yang mengikat untuk dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan sebagai upaya mewujudkan dukungan pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Direktorat

Jenderal Perkebunan yang berkualitas. Penetapan kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2022 dalam wujud Perjanjian Kinerja Sekretaris Direktur Jenderal Perkebunan dengan Direktur

Jenderal Perkebunan, dijabarkan dalam 2 (dua) Sasaran dan dirinci ke dalam 6 (enam) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang masing-masing ditargetkan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.1.

**Tabel 2.1** Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2022

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Birokrasi Direktorat Jenderal Perkebunan yang Efektif dan Efisien	Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Perkebunan	32,72 Nilai
		Tingkat Kepuasan unit Eselon II lingkup Ditjen Perkebunan terhadap layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan yang diberikan	3,00 Skala Likert (1-4)
		Level maturitas penyelenggaraan SPIP Ditjen Perkebunan	3,00 Level
		Persentase rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian terkait Ditjen Perkebunan yang ditindaklanjuti Ditjen Perkebunan	80,00%
		Persentase rekomendasi hasil audit yang ditindaklanjuti Ditjen Perkebunan terhadap total rekomendasi hasil audit yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal	85,00%
2.	Terkelolanya Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan	85,00 Nilai

Sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2022, dalam upaya mencapai 2 (dua) sasaran strategis tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan didukung pendanaan dalam kegiatan

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen. Perkebunan sebesar Rp. 241.348.123.000 yang dibagi ke dalam 4 Klasifikasi Rincian Output Program dan 14 Rincian Output Program sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.2.

**Tabel 2.2** Rekapitulasi Alokasi Anggaran Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Tahun 2022

Kode	Program/Kegiatan/KRO/RO	Pagu Anggaran (Rp)
<b>018.05.WA</b>	<b>Program Dukungan Manajemen</b>	<b>241.348.123.000</b>
<b>1780</b>	<b>Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen. Perkebunan</b>	<b>241.348.123.000</b>
<b>1780.EBA</b>	<b>Layanan Dukungan Manajemen Internal</b>	<b>132.613.111.000</b>
1780.EBA.956	Layanan BMN	5.926.600.000
1780.EBA.957	Layanan Hukum	4.660.000.000
1780.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat	5.964.893.000
1780.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	550.676.000
1780.EBA.962	Layanan Umum	27.844.507.000
1780.EBA.963	Layanan Data dan Informasi	5.656.054.000
1780.EBA.994	Layanan Perkantoran	82.010.381.000
<b>1780.EBB</b>	<b>Layanan Sarana dan Prasarana Internal</b>	<b>8.642.849.000</b>
1780.EBB.951	Layanan Sarana Internal	6.385.609.000
1780.EBB.971	Layanan Prasarana Internal	2.257.240.000
<b>1780.EBC</b>	<b>Layanan Manajemen SDM Internal</b>	<b>4.967.935.000</b>
1780.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	4.967.935.000
<b>1780.EBD</b>	<b>Layanan Manajemen Kinerja Internal</b>	<b>95.124.228.000</b>
1780.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	80.473.311.000
1780.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	5.594.230.000
1780.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	8.312.287.000
1780.EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	744.400.000

Perbandingan IKU Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan dalam 5 tahun terakhir dapat dilihat dalam tabel 2.3.

**Tabel 2.3** Perbandingan Indikator Kinerja Tahun 2018, 2019, 2020, 2021, dan 2022

IKU 2018	Target	IKU 2019	Target	IKU 2020	Target	IKU 2021	Target	IKU 2022	Target
-	-	-	-	Nilai PMRB Direktorat Jenderal Perkebunan	32,58 Nilai	Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Perkebunan	32,62 Nilai	Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Perkebunan	32,72 Nilai
Tingkat Kepuasan unit kerja lain di lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan terhadap layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan	3,60 Skala Likert 1-5	Tingkat Kepuasan unit kerja lain di lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan terhadap layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan	3,00 Skala Likert 1-5	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Layanan Publik Direktorat Jenderal Perkebunan	3,00 Nilai IKM (skala likert)	Tingkat Kepuasan unit Eselon II lingkup Ditjen Perkebunan terhadap layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan yang diberikan	3,00 Skala Likert (1-4)	Tingkat Kepuasan unit Eselon II lingkup Ditjen Perkebunan terhadap layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan yang diberikan	3,00 Skala Likert (1-4)
-	-	-	-	-	-	Level maturitas penyelenggaraan SPIP Ditjen Perkebunan	3,00 Level	Level maturitas penyelenggaraan SPIP Ditjen Perkebunan	3,00 Level
Rasio rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti terhadap total rekomendasi BPK	95,00%	Rasio rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti terhadap total rekomendasi BPK	95,00%	-	-	Persentase rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian terkait Ditjen Perkebunan yang ditindaklanjuti Ditjen Perkebunan	75,00%	Persentase rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian terkait Ditjen Perkebunan yang ditindaklanjuti Ditjen Perkebunan	80,00%
Rasio rekomendasi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian yang ditindaklanjuti terhadap total rekomendasi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian	95,00%	Rasio rekomendasi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian yang ditindaklanjuti terhadap total rekomendasi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian	95,00%	-	-	Persentase rekomendasi hasil audit yang ditindaklanjuti Ditjen Perkebunan terhadap total rekomendasi hasil audit yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal	80,00%	Persentase rekomendasi hasil audit yang ditindaklanjuti Ditjen Perkebunan terhadap total rekomendasi hasil audit yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal	85,00%
Nilai Kinerja (NK) (berdasarkan PMK 249 Tahun 2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga)	90,00%	Nilai Kinerja (NK) (berdasarkan PMK 249 Tahun 2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga)	92,00%	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan	85,00 Nilai	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan	85,00 Nilai	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan	85,00 Nilai

Target IKU Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2020 – 2024 dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan dapat dilihat dalam tabel 2.4.

**Tabel 2.4** Sasaran Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2020 - 2024

Sasaran	Indikator Kinerja	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya Birokrasi Direktorat Jenderal Perkebunan yang Efektif dan Efisien	Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Perkebunan	32,58 Nilai	32,62 Nilai	32,72 Nilai	32,75 Nilai	32,91 Nilai
	Tingkat Kepuasan unit Eselon II lingkup Ditjen Perkebunan terhadap layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan yang diberikan	3 Skala Likert (1-4)	3 Skala Likert (1-4)	3 Skala Likert (1-4)	3 Skala Likert (1-4)	3 Skala Likert (1-4)
	Level maturitas penyelenggaraan SPIP Ditjen Perkebunan	-	3 Level	3 Level	3 Level	4 Level
	Persentase rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian terkait Ditjen Perkebunan yang ditindaklanjuti Ditjen Perkebunan	-	75%	80%	85%	85%
	Persentase rekomendasi hasil audit yang ditindaklanjuti Ditjen Perkebunan terhadap total rekomendasi hasil audit yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal	-	80%	85%	90%	90%
Terkelolanya Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan	85 Nilai	85 Nilai	85 Nilai	85 Nilai	85 Nilai



# III. AKUNTABILITAS KINERJA

CAPAIAN KINERJA  
REALISASI ANGGARAN



### III. AKUNTABILITAS KINERJA

#### CAPAIAN KINERJA

Pengukuran capaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan selama tahun 2022 diperoleh dengan cara menghitung realisasi tiap-tiap Indikator Kinerja Utama pada perjanjian kinerja dibandingkan dengan target. Pola pengukuran kinerja dengan pendekatan IKU memberikan informasi yang lebih objektif terutama memberikan arah organisasi berjalan dengan lebih baik

dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan. Teknik pengukuran kinerja terhadap indikator dan target Perjanjian Kinerja dilakukan dengan melakukan pengumpulan data secara kuantitatif terkait penyelenggaraan kegiatan administrasi dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya ditjen perkebunan. Adapun pencapaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 3.1.

**Tabel 3.1** Capaian Indikator Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2022

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya Birokrasi Direktorat Jenderal Perkebunan yang Efektif dan Efisien	Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Perkebunan	32,72 Nilai	35	106,97%
		Tingkat Kepuasan unit Eselon II lingkup Ditjen Perkebunan terhadap layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan yang diberikan	3,00 Skala Likert (1-4)	3,13	104,33%
		Level maturitas penyelenggaraan SPIP Ditjen Perkebunan	3,00 Level	3,774	125,80%
		Persentase rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian terkait Ditjen Perkebunan yang ditindaklanjuti Ditjen Perkebunan	80,00%	87,50%	109,38%
		Persentase rekomendasi hasil audit yang ditindaklanjuti Ditjen Perkebunan terhadap total rekomendasi hasil audit yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal	85,00%	86,36%	101,60%

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
2.	Terkelolanya Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan	85,00 Nilai	91,04	107,11%

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.1, selama tahun 2022, dari 6 (enam) IKU yang terdapat pada Perjanjian Kinerja, seluruhnya berstatus hijau (sesuai/melebihi target). Adapun penjelasan detail mengenai capaian Sasaran dan Indikator Kinerja pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

### 1. Terwujudnya Birokrasi Direktorat Jenderal Perkebunan yang Efektif dan Efisien

Tujuan reformasi birokrasi adalah membentuk organisasi yang *agile*, efektif dan efisien serta peningkatan kualitas dan perbaikan citra pelayanan publik. Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, setiap institusi penyelenggara negara dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Pelayanan publik adalah serangkaian kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan sesuai peraturan atas barang/jasa/pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara negara. Dalam rangka mendapatkan penyelenggara negara yang mampu melayani masyarakat dan mampu meletakkan pondasi yang diperlukan bangsa untuk memenangkan persaingan global, diperlukan birokrasi yang fleksibel, lincah dan cepat dalam merespon perubahan, serta mampu menggunakan sumber daya yang tersedia dengan seminimal mungkin untuk mendapatkan

target/output yang telah ditetapkan secara optimal. Dari waktu ke waktu, pemerintah dituntut untuk senantiasa berinovasi meningkatkan layanan yang diberikan kepada masyarakat.

Sebagai jawaban atas tuntutan tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan menempatkan Terwujudnya Birokrasi Direktorat Jenderal Perkebunan yang Efektif dan Efisien sebagai salah satu sasaran yang ditetapkan di dalam dokumen perjanjian kinerja. Sasaran ini diturunkan ke dalam 5 (lima) Indikator Kinerja. Ringkasan capaian Sasaran Terwujudnya Birokrasi Direktorat Jenderal Perkebunan yang Efektif dan Efisien pada tahun 2022 disajikan dalam tabel 3.2

#### a. Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Perkebunan

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) adalah Model Penilaian mandiri yang digunakan sebagai metode untuk melakukan penilaian serta analisis yang menyeluruh terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi dan kinerja instansi pemerintah. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 sudah memasuki periode ketiga yaitu tahun 2020-2024. Agar pelaksanaan reformasi

**Tabel 3.2** Capaian Sasaran Terwujudnya Birokrasi Direktorat Jenderal Perkebunan yang Efektif dan Efisien

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Perkebunan	32,72 Nilai	35	106,97%
Tingkat Kepuasan unit Eselon II lingkup Ditjen Perkebunan terhadap layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan yang diberikan	3,00 Skala Likert (1-4)	3,13	104,33%
Level maturitas penyelenggaraan SPIP Ditjen Perkebunan	3,00 Level	3,774	125,80%
Persentase rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian terkait Ditjen Perkebunan yang ditindaklanjuti Ditjen Perkebunan	80,00%	87,50%	109,38%
Persentase rekomendasi hasil audit yang ditindaklanjuti Ditjen Perkebunan terhadap total rekomendasi hasil audit yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal	85,00%	86,36%	101,60%

birokrasi dapat berjalan sesuai dengan arah yang telah ditetapkan, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari hasil pelaksanaannya. Di samping itu monitoring dan evaluasi juga dimaksudkan untuk memberikan masukan dalam menyusun rencana aksi perbaikan berkelanjutan bagi pelaksanaan reformasi birokrasi tahun berikutnya. Penilaian Reformasi Birokrasi merupakan instrumen penilaian kemajuan

pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan oleh KemenPANRB. Kegiatan dilakukan dengan Penilaian Mandiri (*self assessment*) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang dilaksanakan sesuai dengan panduan yang diberikan oleh KemenPANRB yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 terdapat beberapa unsur penilaian sebagaimana berikut:

**Tabel 3.3** Rincian Hasil Evaluasi Komponen Penilaian PMPRB

No.	Nama Layanan	Bobot	Nilai
A.	Pengungkit		35,00
I.	Pemenuhan		14,00
	1. Manajemen Perubahan	2,00	2,00
	2. Deregulasi Kebijakan	1,00	1,00
	3. Penataan dan Penguatan Organisasi	2,00	2,00

No.	Nama Layanan	Bobot	Nilai
4.	Penataan Tata Laksana	1,00	1,00
5.	Penataan Sistem Manajemen SDM	1,40	1,40
6.	Penguatan Akuntabilitas	2,50	2,25
7.	Penguatan Pengawasan	2,20	1,95
8.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	2,50	2,40
II.	Reform		21,00
1.	Manajemen Perubahan	3,00	3,00
2.	Deregulasi Kebijakan	2,00	2,00
3.	Penataan dan Penguatan Organisasi	1,50	1,50
4.	Penataan Tata Laksana	3,75	3,75
5.	Penataan Sistem Manajemen SDM	2,00	1,75
6.	Penguatan Akuntabilitas	3,75	3,30
7.	Penguatan Pengawasan	1,95	1,95
8.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	3,75	3,75

IKU ini memiliki target sebesar 32,72 di tahun 2022. Dengan Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Perkebunan sebesar 35,00, capaian IKU ini menjadi 106,97%. Rincian capaian IKU dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.4** Capaian IKU Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Perkebunan

Terwujudnya Birokrasi Direktorat Jenderal Perkebunan yang Efektif dan Efisien		
1-1 Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Perkebunan		
Target	Realisasi	Capaian
32,72	35,00	106,97%

Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Perkebunan baru dijadikan IKU pada tahun 2020 sehingga tidak terdapat perbandingan antar tahun sebelum tahun 2020 yang dapat disajikan. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tren nilai reformasi birokrasi dari tahun 2020 sampai dengan 2022 adalah terus meningkat dari tahun ke tahun sebagaimana terlihat dalam tabel dibawah ini.

**Tabel 3.5** Capaian Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2020 - 2022

	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
Target	32,58	32,62	32,72
Realisasi	32,58	33,51	35,00
Capaian	100%	102,73%	106,97%

Berdasarkan data tersebut dapat terlihat bahwa nilai indeks reformasi birokrasi Direktorat Jenderal Perkebunan selalu meningkat setiap tahunnya. Peningkatan ini mencerminkan upaya sungguh-sungguh yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal

Perkebunan dalam melaksanakan reformasi di berbagai aspek birokrasi, layanan publik, dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka perbaikan proses bisnis untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas organisasi.

**Tabel 3.6** Capaian Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Perkebunan dibandingkan Target Renstra

Target Renstra	Realisasi	Capaian
32,91	35,00	106,35%

Nilai realisasi IKU tersebut telah melampaui target akhir jangka menengah yang ditetapkan dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2020-2024. Nilai tersebut merefleksikan adanya proses pengelolaan reformasi di Direktorat Jenderal Perkebunan telah melalui tata kelola yang baik dimana terdapat harmonisasi antara perencanaan strategis, implementasi reformasi birokrasi, serta monitoring dan evaluasinya.

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan dalam mendukung pencapaian target indikator Nilai PMPRB adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap rencana kerja tim reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan serta menindaklanjuti hasil evaluasi
2. Sosialisasi/Internalisasi Road Map/ Rencana Kerja Reformasi Birokrasi telah dilaksanakan dan disampaikan kepada seluruh pejabat/pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Perkebunan
3. Direktorat Jenderal Perkebunan telah memiliki *Agent of Change* (AOC) yang membuat perubahan berupa Korporasi Petani dan Rumah Pintar Pekebun
4. Direktorat Jenderal Perkebunan telah melaksanakan revisi terhadap Permentan

No.03Tahun2022tentangPengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit mencabut Permentan No. 07 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permentan No. 15 Tahun 2020

5. Penataan dan Penguatan Organisasi di Direktorat Jenderal Perkebunan telah dilakukan melalui penyusunan proses bisnis, peta lintas fungsi dan evaluasi organisasi dengan pembahasan dan penataan organisasi tata kerja sampai dengan UPT, berdasarkan RPJMN, Renstra dan rencana kerja organisasi
6. Penyusunan SOP baru serta penyesuaian dan penyempurnaan SOP
7. Penetapan Surat Keputusan Pejabat dan Tim Pengelola dan Pelayanan Informasi dan Direktorat Jenderal Perkebunan
8. Penataan Analisis Jabatan telah dilakukan penyesuaian informasi jabatan dan rancangan peta jabatan di lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan
9. Dalam penataan sistem manajemen SDM, Direktorat Jenderal Perkebunan telah melakukan perbaikan atas implementasi IKU, seperti penyelarasan Sasaran, IKU,

dan target dengan strategi organisasi, cascading Sasaran dan IKU dari unit manajemen hingga unit teknis, dan penyelarasan pencapaian IKU cascading dengan kinerja pimpinan. Pemantauan kinerja juga dilaksanakan secara bulanan, triwulanan, dan semesteran, sedangkan penilaian perilaku kinerja pegawai dilakukan secara triwulanan melalui aplikasi SINERGI. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar pengembangan karir individu, yaitu sebagai salah satu dasar penentuan kenaikan peringkat jabatan dan promosi/pengangkatan pegawai dalam jabatan struktural. Selain itu capaian kinerja individu juga digunakan sebagai dasar dalam pemberian *reward* dan dasar pemberian sanksi

10. Penguatan Akuntabilitas dilakukan dengan penyusunan Renstra 2020-2024 yang disesuaikan dengan RPJMN dilanjutkan dengan perjanjian kinerja dan pelaporan kinerja serta monitoring dan evaluasi.
11. Rencana aksi/arahan pimpinan direkam dan dimonitor secara berkala
12. Penerbitan Laporan kepada Direktur Jenderal Perkebunan (Progres TLHP BPK, BPKP, dan Itjen; Laporan Kinerja; Evaluasi SAKIP)
13. SOP Pelayanan Publik dan SOP Pengaduan Pelayanan

Dalam rangka perbaikan ke depan, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan akan terus mengusahakan keberlanjutan dan peningkatan serta penyempurnaan bersama dengan monitoring dan evaluasi atas reformasi birokrasi yang tengah

dijalankan. Dengan dilaksanakannya hal tersebut, diharapkan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan dapat mengampu tujuan reformasi birokrasi secara paripurna, yakni menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

#### **b. Tingkat Kepuasan unit Eselon II lingkup Ditjen Perkebunan terhadap layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan yang diberikan**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan UU ini menjadi dasar program pelayanan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan dalam memberikan pelayanan publik yang prima. Dalam rangka melakukan monitoring pelayanan, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan yang merupakan salah satu unit eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Perkebunan melakukan kegiatan survei kepuasan pengguna layanan dengan ruang lingkup survei adalah pengguna layanan dengan 2 (dua) variabel pengukuran, yaitu kepentingan dan kepuasan yang kemudian diterjemahkan dalam aspek-aspek layanan yang diberikan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan. Survei ini dilakukan untuk memperoleh *feedback* dari pegawai atas layanan yang diberikan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan sehingga dapat diketahui tingkat kepuasan pegawai atas layanan

yang diberikan pada suatu tahun dan dapat digunakan untuk perbaikan layanan berikutnya. Dalam rangka mencapai pelayanan publik yang dapat memuaskan para pengguna layanan dan sebagai bentuk *continuous improvement*, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan memasukkan IKU ini sebagai salah satu indikator kinerja pada Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan. Pada tahun 2022, survei dilaksanakan melalui penyebaran kuesioner secara daring dengan responden survei terdiri atas pegawai unit eselon II di kantor pusat dan UPT

pusat di daerah. Indeks Pengukuran menggunakan skala 1-4 sebagai berikut :

- 4 = Sangat Puas
- 3 = Puas
- 2 = Tidak Puas
- 1 = Sangat Tidak Puas

Hasil survei pada tahun 2022 diperoleh berdasarkan data yang diolah dari jawaban 204 pengguna layanan yang berpartisipasi sebagai responden. Aspek demografi responden meliputi jenis kelamin, latar belakang pendidikan, dan masa kerja sebagaimana ditunjukkan pada tabel 3.7.

**Tabel 3.7** Demografi Survei Kepuasan Layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2022

Aspek Demografi	Jumlah (orang)	%
<b>Jenis Kelamin</b>		
Laki-Laki	100	49,02
Perempuan	104	50,98
<b>Latar Belakang Pendidikan</b>		
SD, SMP	0	0
SMA	36	17,65
Diploma	19	9,31
Sarjana	107	52,45
Pascasarjana	42	20,59
<b>Masa Kerja</b>		
< 1 tahun	17	8,33
1 – 10 tahun	42	20,59
11 – 20 tahun	84	41,18
21 – 30 tahun	41	20,10
31 – 40 tahun	20	9,80

Dari total 204 orang responden dapat ditarik kesimpulan responden sebagian besar adalah perempuan yakni sebanyak 50,98% dibandingkan dengan laki-laki (49,02%). Jika dilihat dari masa kerja maka mayoritas responden berada pada masa kerja 11-20 tahun, yaitu sebanyak 41,18%, diikuti dengan kelompok masa kerja 1-10 tahun sebanyak 20,59%, kelompok masa kerja 21-30 tahun sebanyak 20,10%, kelompok masa kerja 31-40 tahun sebanyak 9,80% dan kelompok masa kerja kurang dari setahun sebanyak 8,33%. Dilihat dari latar belakang pendidikan, responden sebagian besar memiliki Pendidikan yang tinggi. Lebih dari setengah responden tepatnya 52,45% berjenjang

pendidikan terakhir Sarjana, dan sebanyak 20,59% berjenjang Pendidikan pasca sarjana. Sedangkan responden yang memiliki jenjang Pendidikan di bawahnya yaitu diploma sebanyak 9,31%. Responden dengan latar belakang SMA dan sederajat sebanyak 17,65% dan tidak ada responden yang memiliki Pendidikan terakhir SMA ke bawah. Hal tersebut menunjukkan pendidikan responden berasal dari Pendidikan menengah hingga tinggi, di mana responden dianggap mampu memahami dan menjawab pertanyaan dalam kuesioner.

Target IKU tersebut untuk tahun 2022 adalah sebesar 3,00 dengan periode pelaporan tahunan.

**Tabel 3.8** Capaian IKU Tingkat Kepuasan unit Eselon II lingkup Ditjen Perkebunan terhadap layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan yang diberikan

Terwujudnya Birokrasi Direktorat Jenderal Perkebunan yang Efektif dan Efisien		
1-2 Tingkat Kepuasan unit Eselon II lingkup Ditjen Perkebunan terhadap layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan yang diberikan		
Target	Realisasi	Capaian
3.00 Skala Likert (1-4)	3,13	104,33%

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa realisasi IKU sebesar 3,13 untuk tahun 2022 tersebut lebih tinggi dari target IKU tahun tersebut pada perjanjian kinerja (3,00).

Keberhasilan capaian ini tidak lepas dari peran serta segenap pegawai dalam memberikan pelayanan yang optimal. Rincian skor untuk aspek layanan yang diteliti ditunjukkan Tabel 3.9.

**Tabel 3.9** Hasil Survei Kepuasan Layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2022

No.	Unsur yang dinilai	Kepentingan (NRR per Unsur)	NRR Tertimbang per Unsur	Kepuasan (NRR per Unsur)	NRR Tertimbang per Unsur	Gap	Customer Satisfaction Index (%)
	<b>Nilai IKM</b>		<b>3,39</b>		<b>3,13</b>		
	<b>Tangibles (Berwujud)</b>	<b>3,38</b>		<b>3,07</b>		<b>-0,30</b>	<b>91,11</b>
1.	Kebersihan lingkungan ruang kerja	3,44	0,17	3,11	0,16	-0,33	90,41
2.	Kenyamanan Ruang Rapat	3,40	0,17	3,14	0,16	-0,26	92,35

No.	Unsur yang dinilai	Keentingan (NRR per Unsur)	NRR Tertimbang per Unsur	Kepuasan (NRR per Unsur)	NRR Tertimbang per Unsur	Gap	Customer Satisfaction Index (%)
3.	Kelengkapan Fasilitas Ruang Rapat sesuai Kebutuhan (AC, kursi, meja, lampu, infocus, mic teleconference, WIFI)	3,41	0,17	3,08	0,15	-0,33	90,32
4.	Kebersihan Toilet	3,42	0,17	3,03	0,15	-0,39	88,60
5.	Kelengkapan Toilet: kecukupan air, penerangan, wastafel, kaca, sabun, pewangi ruangan, penghisap udara, keset, tempat sampah, tisu	3,39	0,17	2,91	0,15	-0,48	85,84
6.	Kerapihan pegawai Sekretariat Ditjen Perkebunan	3,33	0,17	3,17	0,16	-0,16	95,20
7.	Dekorasi tanaman hidup di luar dan dalam kantor	3,24	0,16	3,08	0,15	-0,16	95,06
	<b>Reliability (Kehandalan)</b>	<b>3,40</b>		<b>3,18</b>		<b>-0,23</b>	<b>93,32</b>
1.	Mekanisme layanan Sekretariat Ditjen Perkebunan	3,42	0,17	3,16	0,16	-0,26	92,40
2.	Konsultasi/ informasi Sekretariat Ditjen Perkebunan	3,39	0,17	3,20	0,16	-0,19	94,40
3.	Totalitas pegawai Sekretariat Ditjen Perkebunan dalam memberikan layanan	3,40	0,17	3,19	0,16	-0,21	93,82
4.	Ketepatan waktu pegawai Sekretariat Ditjen Perkebunan terhadap penyelesaian permintaan layanan	3,40	0,17	3,15	0,16	-0,25	92,65
	<b>Responsiveness (Daya Tanggap)</b>	<b>3,39</b>		<b>3,15</b>		<b>-0,24</b>	<b>92,93</b>
1.	Pemberian solusi dalam penyelesaian masalah yang berkaitan dengan layanan Sekretariat Ditjen Perkebunan	3,38	0,17	3,15	0,16	-0,23	93,20
2.	Kemampuan pegawai Sekretariat Ditjen Perkebunan dalam melayani pengguna layanan	3,39	0,17	3,18	0,16	-0,21	93,81
3.	Kecepatan petugas Sekretariat Ditjen Perkebunan dalam memproses permintaan layanan	3,41	0,17	3,13	0,16	-0,28	91,79
	<b>Assurance (Kepastian)</b>	<b>3,39</b>		<b>3,16</b>		<b>-0,23</b>	<b>93,21</b>
1.	Kompetensi pegawai dalam memberikan layanan	3,38	0,17	3,17	0,16	-0,21	93,79
2.	Ketepatan solusi dalam menyelesaikan masalah layanan dari Sekretariat Ditjen Perkebunan	3,38	0,17	3,16	0,16	-0,22	93,49

No.	Unsur yang dinilai	Kepentingan (NRR per Unsur)	NRR Tertimbang per Unsur	Kepuasan (NRR per Unsur)	NRR Tertimbang per Unsur	Gap	Customer Satisfaction Index (%)
3.	Kesesuaian SOP terkait pelaksanaan layanan dari Sekretariat Ditjen Perkebunan	3,40	0,17	3,14	0,16	-0,26	92,35
	<b>Penilaian terhadap Empati</b>	<b>3,39</b>		<b>3,15</b>		<b>-0,24</b>	<b>92,82</b>
1	Keramahan Pegawai Sekretariat Ditjen Perkebunan dalam memberikan layanan	3,41	0,17	3,16	0,16	-0,25	92,67
2	Keinisiafian pegawai dalam memberikan layanan Sekretariat Ditjen Perkebunan	3,37	0,17	3,13	0,16	-0,24	92,88
3	Kemudahan memperoleh informasi layanan Sekretariat Ditjen Perkebunan	3,39	0,17	3,15	0,16	-0,24	92,92

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel tersebut, pengguna layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan puas terhadap sebagian besar unsur layanan karena berada di atas angka 3 (tiga) yang dalam skala likert 1-4 berarti puas atau berkinerja baik. Namun untuk aspek Kelengkapan Toilet: kecukupan air, penerangan, wastafel, kaca, sabun, pewangi ruangan, penghisap udara, keset, tempat sampah, tisu (skor 2,91) masih perlu untuk ditinjau kembali karena pengguna layanan masih merasa tidak puas. Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan perlu terus

meningkatkan kualitas pada semua aspek layanan.

Namun jika dilihat dari *gap* antara skor tingkat kepentingan menurut harapan para pengguna layanan dengan tingkat kepuasan yang dirasakan pengguna layanan, belum ada aspek yang memiliki *gap* positif atau melampaui harapan pengguna layanan, sehingga hal ini layak menjadi perhatian Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan. Perkembangan capaian IKU tersebut tahun dari 2018 s.d. 2022 dapat diketahui dari perbandingan yang ditunjukkan sebagai berikut.

**Tabel 3.10** Capaian Tingkat Kepuasan unit Eselon II lingkup Ditjen Perkebunan terhadap layanan Sekretariat Direktorat Jenderal

	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
Target	3,6 Skala likert 1-5	3,7 Skala likert 1-5	-	3,00 Skala likert 1-4	3,00 Skala likert 1-4
Realisasi	3,6	3,6	-	3,18	3,13
Capaian	100%	97,30%	-	106%	104,33%

Dalam tabel perbandingan di atas terlihat bahwa pada tahun 2021 target IKU ini menurun, hal ini disebabkan karena terdapat perubahan skala penilaian, sedangkan untuk tahun 2020 indikator yang digunakan adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Layanan Publik Direktorat Jenderal

Perkebunan sehingga hasil survei merupakan penilaian atas layanan Direktorat Jenderal Perkebunan dan tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan target dan capaian pada tahun-tahun sebelumnya maupun setelahnya.

**Tabel 3.11** Capaian Tingkat Kepuasan unit Eselon II lingkup Ditjen Perkebunan terhadap layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan yang diberikan dibandingkan Target Renstra

Target Renstra	Realisasi	Capaian
3,00	3,13	104,33%

Nilai realisasi IKU tersebut telah melampaui target akhir jangka menengah yang ditetapkan dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2020-2024. Sekretariat Ditjen Perkebunan memiliki komitmen yang kuat dalam melaksanakan pemenuhan kebutuhan pegawai dan organisasi dengan memperhatikan kepentingan dan kepuasan pegawai terhadap layanan yang diberikan. Namun dalam pencapaian IKU tersebut, masih diperlukan peningkatan kinerja pegawai dalam memberikan layanan pada unit kerja lingkup Kantor Pusat dan/atau UPT Pusat.

Langkah-langkah strategis yang akan dilakukan ke depan untuk meningkatkan kualitas layanan adalah sebagai berikut:

- Menyusun matriks tindak lanjut hasil survei tahun sebelumnya.
- Secara kontinu memperbaiki layanan sesuai dengan harapan pengguna layanan sebagaimana rekomendasi atas hasil survei pada tahun-tahun sebelumnya.
- Menetapkan kebijakan secara taktis dan strategis guna meningkatkan kinerja

pelayanan dari waktu ke waktu

- Menyelenggarakan forum untuk menjaring masukan dari pengguna layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan.
- Melaksanakan proses penilaian survei dengan baik, seperti penyusunan long list responden serta internalisasi hasil survei kepuasan pengguna layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan
- Level maturitas penyelenggaraan SPIP Ditjen Perkebunan**

Sejalan dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan terus berkomitmen untuk memperkuat Sistem Pengendalian Intern dalam rangka mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Melalui sinergi dan kolaborasi antara Direktorat Jenderal Perkebunan dengan koordinasi oleh Inspektorat Jenderal, inisiatif kegiatan yang telah dilakukan pada

tahun 2022 yaitu Internalisasi Kebijakan terkait Sistem Pengendalian Intern. Upaya internalisasi kebijakan terkait Sistem Pengendalian Intern penting dilakukan agar semakin meningkatkan kesadaran dan pemahaman pimpinan dan pegawai Direktorat Jenderal Perkebunan dalam rangka memperkuat penerapan Sistem Pengendalian Intern. Pada tahun 2022, diselenggarakan kegiatan koordinasi tim SPI lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan yang dihadiri oleh para pimpinan unit kerja setingkat eselon III di Direktorat Jenderal Perkebunan dengan melibatkan Tim Satuan Pelaksana SPI dan menghadirkan Direktur Pengawasan Bidang Pangan, Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Alam BPKP dan auditor Inspektorat Jenderal selaku pemateri.

Alat ukur yang dipakai mengacu pada Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Pelaksanaannya dilakukan oleh APIP K/L, dalam hal ini Inspektorat Jenderal. Sesuai Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021, ruang lingkup penilaian atas maturitas SPIP terintegrasi yaitu:

- 1) Mekanisme Penilaian, terdiri dari:
  - a) Penilaian mandiri (PM) oleh manajemen Direktorat Jenderal Perkebunan dalam hal ini koordinasi dilaksanakan oleh

Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan beserta Tim Penilaian Mandiri SPIP lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan dan Tim APIP Inspektorat Jenderal,

- b) Penjaminan kualitas (PK) oleh aparat pengawasan intern pemerintah pada K/L/Pemda dalam hal ini dilakukan oleh Inspektorat Investigasi, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian
- 2) Fokus Penilaian, adalah tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP yang mencakup unsur-unsur:
    - a) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
    - b) Manajemen Risiko Indeks (MRI) adalah indeks yang menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang diperoleh dari perhitungan parameter penilaian pengelolaan risiko.
    - c) Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK) adalah kerangka pengukuran atas kemajuan segala upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi di organisasi.

- d) Kapabilitas APIP. Penilaian Kapabilitas APIP dinilai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
- 3) Komponen Penilaian, terdiri dari:
- Penetapan tujuan, untuk menilai kualitas sasaran strategis dan strategi pencapaian sasaran strategis,
  - Struktur dan proses, untuk menilai kualitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP yang tercermin dari pemenuhan 5 (lima) unsur SPIP antara lain lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan penilaian,
  - Pencapaian tujuan, untuk menilai pencapaian hasil penyelenggaraan SPIP, yang terdiri dari efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
- 4) Periode yang Dinilai adalah sebagai berikut:
- Penetapan tujuan dilakukan atas dokumen perencanaan tahun berjalan,
  - Struktur dan proses dilakukan atas pengendalian yang dilaksanakan pada tahun berjalan, dan
  - Pencapaian tujuan dilakukan atas kinerja tahun sebelumnya.
- Tujuan dilakukannya penilaian maturitas SPIP di Direktorat Jenderal Perkebunan adalah untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPIP dan memberikan saran peningkatan tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP pada Direktorat Jenderal Perkebunan, dengan harapan dapat (a) memberikan perbaikan kualitas perencanaan, (b) membantu upaya mitigasi risiko *fraud* dan, (c) meningkatkan kualitas SPIP berkelanjutan.
- Pelaksanaan dilakukan dengan pengumpulan dan pengujian bukti pendukung penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP. Pengumpulan bukti dilakukan dengan menggunakan salah satu atau kombinasi dari teknik pengumpulan bukti sesuai dengan pertimbangan Tim Penilaian Mandiri SPIP Direktorat Jenderal Perkebunan dan penjamin kualitas yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Inspektorat Jenderal. Teknik pengumpulan bukti meliputi wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP Direktorat Jenderal Perkebunan dilakukan dengan pendekatan kuantitatif pada 3 (tiga) komponen maturitas penyelenggaraan SPIP.
- Target untuk tahun 2022 adalah sebesar 3,00 dengan periode pelaporan tahunan. Realisasi capaian IKU level maturitas penyelenggaraan SPIP Ditjen Perkebunan adalah sebesar 3,774, angka tersebut didapat dari hasil penjaminan kualitas. Dengan demikian, capaian realisasi IKU tersebut pada tahun 2022 terhadap targetnya dapat ditunjukkan sebagai berikut.

**Tabel 3.12** Capaian IKU Level Maturitas Penyelenggaraan SPIP Ditjen Perkebunan

Terwujudnya Birokrasi Direktorat Jenderal Perkebunan yang Efektif dan Efisien		
1-3 Level Maturitas Penyelenggaraan SPIP Ditjen Perkebunan		
Target	Realisasi	Capaian
3.00	3.774	125,80%

Berikut rincian penjaminan kualitas terhadap komponen, unsur dan sub unsur:

**Tabel 3.13** Nilai Unsur Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP

Komponen, Unsur, dan Subunsur Penilaian	Skor	Bobot Unsur	Nilai Unsur
Penetapan Tujuan			
Kualitas Sasaran Strategis	5	50%	2,50
Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis	5	50%	2,50
<b>SUB JUMLAH PERENCANAAN</b>	<b>10</b>	<b>100%</b>	<b>5,00</b>
<b>BOBOT PERENCANAAN</b>		<b>40%</b>	<b>2,00</b>
Struktur dan Proses			
Lingkungan Pengendalian			
Penegakan Integritas dan Nilai Etika (1.1)	4,25	3,75%	0,16
Komitmen terhadap Kompetensi (1.2)	4,5	3,75%	0,17
Kepemimpinan yang Kondusif (1.3)	3,357	3,75%	0,13
Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan (1.4)	4	3,75%	0,15
Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat (1.5)	4,5	3,75%	0,17
Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM (1.6)	3,5	3,75%	0,13
Perwujudan Peran APIP yang Efektif (1.7)	3	3,75%	0,11
Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait (1.8)	3,375	3,75%	0,13
Penilaian Risiko			
Identifikasi Risiko (2.1)	3,333	10%	0,33
Analisis Risiko (2.2)	2,442	10%	0,24
Kegiatan Pengendalian			
Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah (3.1)	4	2,27%	0,09

Komponen, Unsur, dan Subunsur Penilaian	Skor	Bobot Unsur	Nilai Unsur
Pembinaan Sumber Daya Manusia (3.2)	4	2,27%	0,09
Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi (3.3)	4,75	2,27%	0,11
Pengendalian Fisik atas Aset (3.4)	3,25	2,27%	0,07
Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja (3.5)	3	2,27%	0,07
Pemisahan Fungsi (3.6)	3	2,27%	0,07
Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting (3.7)	3	2,27%	0,07
Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian (3.8)	3	2,27%	0,07
Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatannya (3.9)	3	2,27%	0,07
Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya (3.10)	3	2,27%	0,07
Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting (3.11)	3	2,27%	0,07
Informasi dan Komunikasi			
Informasi yang Relevan (4.1)	2,938	5%	0,15
Komunikasi yang Efektif (4.2)	2,5	5%	0,13
Pemantauan			
Pemantauan Berkelanjutan (5.1)	2,75	7,50%	0,21
Evaluasi Terpisah (5.2)	3	7,50%	0,23
<b>SUB JUMLAH STRUKTUR DAN PROSES</b>		<b>100%</b>	<b>3,265</b>
<b>BOBOT STRUKTUR DAN PROSES</b>		<b>30%</b>	<b>0,979</b>
Pencapaian Tujuan SPIP			
Efektivitas dan Efisiensi			
Capaian <i>Outcome</i>	3	15%	0,45
Capaian <i>Output</i>	4	15%	0,60
Keandalan Laporan Keuangan			
Opini LK	3	25%	0,75
Pengamanan Atas Aset			
Keamanan Administrasi	3	10%	0,30
Keamanan Fisik	3	5%	0,15
Keamanan Hukum	2	10%	0,20

Komponen, Unsur, dan Subunsur Penilaian	Skor	Bobot Unsur	Nilai Unsur
Ketaatan Pada Peraturan			
Temuan Ketaatan – BPK	1	20%	0,20
<b>SUB JUMLAH PENCAPAIAN TUJUAN SPIP</b>		<b>100%</b>	<b>2,65</b>
<b>BOBOT HASIL</b>		<b>30%</b>	<b>0,795</b>
<b>NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP</b>			<b>3,774</b>

Simpulan hasil penjaminan kualitas maturitas SPIP tahun 2021/2022 yang telah disusun dan telah dilaporkan kepada Biro Keuangan dan Barang Milik Negara sebesar 3,774 yang berada pada level “terdefinisi”. Dengan perolehan tingkat maturitas “terdefinisi” maka karakteristik penyelenggaraan SPIP secara umum menunjukkan bahwa Direktorat Jenderal Perkebunan telah

mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, praktik pengendalian intern telah dilaksanakan dan terdokumentasi dengan baik. Namun evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai. Rincian simpulan penilaian mandiri maturitas SPIP adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.14** Skor Komponen Penilaian Maturitas SPIP

Komponen Penilaian	Nilai
Penetapan Tujuan	5,00
Struktur dan Proses	3,265
Pencapaian Tujuan SPIP	2,65
Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP	3,774
Nilai Indeks Penerapan MRI	3,367
Nilai IEPK	3,61
Kapabilitas APIP	3,00

Sebagaimana ditunjukkan di atas, realisasi IKU sebesar 3,774 tersebut melampaui targetnya pada tahun 2022 (3,00). Perbandingan

realisasi IKU tersebut dengan realisasi tahun-tahun sebelumnya dapat ditunjukkan sebagai berikut.

**Tabel 3.15** Capaian Level Maturitas Penyelenggaraan SPIP Ditjen Perkebunan Tahun 2021 - 2022

	Tahun 2021	Tahun 2022
Target	3,00	3,00
Realisasi	3,65	3,774
Capaian	121,67%	125,80%

Sebagaimana ditunjukkan di atas, realisasi IKU tersebut pada tahun 2022 meningkat dibandingkan dengan realisasi tahun 2021. Mengingat IKU tersebut baru diterapkan untuk tahun 2021, sementara pada Perjanjian

Kinerja Tahun 2018 s.d. 2020 tidak ditargetkan, sehingga perbandingan capaian IKU tersebut dengan tahun 2018 s.d. 2020 tidak dapat dilakukan.

**Tabel 3.16** Capaian Level Maturitas Penyelenggaraan SPIP Ditjen Perkebunan dibandingkan Target Renstra

Target Renstra	Realisasi	Capaian
4,00	3,774	94,35%

Nilai realisasi IKU tersebut belum melampaui target akhir jangka menengah yang ditetapkan dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2020-2024. Untuk itu perlu adanya upaya yang lebih baik lagi pada periode selanjutnya dalam pencapaian target kinerja Level Maturitas Penyelenggaraan SPIP Ditjen Perkebunan, dalam rangka mencapai target akhir renstra.

Rekomendasi rencana aksi yang akan dilakukan dalam pencapaian IKU tersebut adalah melakukan monitoring dan asistensi secara aktif terhadap perkembangan penyiapan laporan dan dokumen pendukung sesuai kriteria penilaian.

#### d. Persentase rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian terkait Ditjen Perkebunan yang ditindaklanjuti Ditjen Perkebunan

Direktorat Jenderal Perkebunan sebagai unit eselon I lingkup Kementerian Pertanian wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kepada Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian untuk dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Kementerian Pertanian. Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara diwujudkan dengan

penyusunan laporan keuangan oleh pemerintah, sehingga dapat memberikan keyakinan yang memadai atas terciptanya tujuan instansi, aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyusunan laporan keuangan pemerintah harus disusun secara profesional dan modern. Pengendalian kualitas laporan keuangan Pemerintah dapat diidentifikasi dari penyelesaian rekomendasi BPK.

Tindak lanjut Pemerintah terhadap Temuan Pemeriksaan (TP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan perlu diselesaikan sebagaimana yang direkomendasikan oleh BPK. Setiap Pengguna Anggaran diwajibkan melaksanakan tindak lanjut dan menyampaikan laporan pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi terkait TP BPK tersebut. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 bahwa pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi disampaikan kepada BPK. Selanjutnya BPK melakukan pemantauan dan melaporkan hasil pemantauan tindak lanjut.

IKU ini disusun untuk memantau penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi BPK serta menjamin akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban keuangan negara. BPK menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tindak lanjut yang merupakan bagian dari LK. Sesuai ketentuan, BPK akan menyampaikan jumlah rekomendasi yang selesai dari seluruh rekomendasi BPK yang belum selesai. Pemerintah tetap wajib melanjutkan penyelesaian tindak lanjut, baik atas rekomendasi BPK yang belum selesai, maupun atas rekomendasi yang belum disampaikan dalam LHP. Pengukuran penyelesaian rekomendasi didefinisikan sebagai temuan yang telah selesai ditindaklanjuti terhadap temuan/

rekomendasi BPK. Temuan-temuan pemeriksaan yang oleh BPK dinyatakan selesai ditindaklanjuti adalah temuan-temuan pemeriksaan yang saran/rekomendasinya telah ditindaklanjuti secara nyata dan tuntas oleh pihak entitas yang diperiksa sehingga diharapkan dapat memperbaiki pengelolaan dan tanggung jawab keuangan pada entitas yang bersangkutan.

Pengukuran IKU tersebut menggunakan periode pelaporan tahunan. Target IKU tersebut untuk tahun 2022 adalah 80%. Target tahun 2022 tersebut mengalami kenaikan dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2021 yaitu sebesar 75%. Capaian atas IKU dapat diketahui dari sebagaimana perhitungan pada Tabel berikut:

**Tabel 3.17** Capaian IKU Persentase rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian terkait Ditjen Perkebunan yang ditindaklanjuti Ditjen Perkebunan

Terwujudnya Birokrasi Direktorat Jenderal Perkebunan yang Efektif dan Efisien		
1-4 Persentase rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian terkait Ditjen Perkebunan yang ditindaklanjuti Ditjen Perkebunan		
Target	Realisasi	Capaian
80,00%	87,50%	109,38%

Realisasi IKU adalah sebesar 87.50% (melampaui target 80.00%) sehingga capaiannya sebesar 109,38%. Dari 16 rekomendasi (hasil pemeriksaan sampai dengan tahun 2022) yang harus diselesaikan

tindaklanjutnya, 14 rekomendasi telah dinyatakan selesai pada pembahasan tindak lanjut rekomendasi dengan BPK. Perbandingan capaian dan target IKU tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.18** Capaian Persentase rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian terkait Ditjen Perkebunan yang ditindaklanjuti Ditjen Perkebunan Tahun 2018 - 2022

	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
Target	95%	95%	-	75%	80%
Realisasi	94,44%	95,65%	-	77,14%	87,50%
Capaian	99,41%	100,68%	-	102,85%	109,38%

Sebagaimana ditunjukkan di atas, capaian IKU tersebut terus meningkat dari tahun 2018 sampai dengan 2022, mulai tahun 2019 capaian telah konsisten melampaui target tahunan yang ditetapkan, menunjukkan

bahwa upaya keras yang positif senantiasa ditunjukkan untuk penyelesaian rekomendasi BPK. Namun untuk tahun 2020, IKU ini tidak terdapat dalam perjanjian kinerja, sehingga data tidak dapat disajikan.

**Tabel 3.19** Capaian Persentase rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian terkait Ditjen Perkebunan yang ditindaklanjuti Ditjen Perkebunan dibandingkan Target Renstra

Target Renstra	Realisasi	Capaian
85%	87,50%	102,94%

Nilai realisasi IKU tersebut telah melampaui target akhir jangka menengah yang ditetapkan dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2020-2024. Beberapa hal yang menjadi tantangan yang dihadapi dalam penyelesaian rekomendasi BPK pada Direktorat Jenderal Perkebunan, diantaranya adalah rekomendasi berasal dari LHP belasan tahun ke belakang karena tindak lanjut atas rekomendasi BPK sebagian penyelesaiannya membutuhkan waktu penyelesaian lebih dari satu tahun sehingga banyak pelaksana kegiatan yang telah pensiun, sakit maupun meninggal dunia. Tantangan tersebut berimplikasi pada proses penyelesaian tindak lanjut rekomendasi atas hasil pemeriksaan menjadi lebih lama.

Berbagai upaya telah dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan untuk

percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK pada tahun 2022, diantaranya:

- Menyusun target waktu penyelesaian rekomendasi yang jelas dan terukur
- Menjalin komunikasi intensif dan meminta arahan dengan tim percepatan penyelesaian BPK terhadap upaya alternatif penyelesaian
- Menjalin komunikasi intensif dengan satker untuk segera mengupayakan percepatan penyelesaian

Rencana aksi terkait pencapaian IKU ini di tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- Segara menyelesaikan rekomendasi yang masih baru terutama rekomendasi administrasi
- Melakukan penyetoran kembali dalam waktu yang tidak terlalu lama terhadap rekomendasi kerugian negara

**e. Persentase rekomendasi hasil audit yang ditindaklanjuti Ditjen Perkebunan terhadap total rekomendasi hasil audit yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal**

Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian terhadap kinerja dan keuangan salah satunya melalui audit. Audit dilakukan untuk meningkatkan kinerja secara berkesinambungan, dengan memperhatikan beberapa aspek diantaranya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan prinsip ekonomis, efektivitas dan efisien. Dengan dilakukannya audit dan disusunnya laporan hasil audit diharapkan dapat memberikan keyakinan yang memadai atas terkelolanya organisasi yang baik dan taat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengendalian internal organisasi dapat diidentifikasi dari penyelesaian rekomendasi hasil audit Inspektorat Jenderal.

IKU ini disusun untuk memantau penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil audit Inspektorat Jenderal serta menjamin akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban pengelolaan organisasi. Inspektorat Jenderal akan menyampaikan jumlah rekomendasi yang selesai dari seluruh rekomendasi yang belum selesai. Temuan-temuan pemeriksaan yang oleh Inspektorat Jenderal dinyatakan selesai ditindaklanjuti adalah temuan-temuan pemeriksaan yang saran/rekomendasinya telah ditindaklanjuti secara nyata dan tuntas oleh pihak entitas yang diperiksa sehingga diharapkan dapat memperbaiki pengelolaan internal organisasi yang bersangkutan.

Pengukuran IKU tersebut menggunakan periode pelaporan tahunan. Target IKU tersebut untuk tahun 2022 adalah 85%. Target tahun 2022 tersebut mengalami kenaikan dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2021 yaitu sebesar 80%. Capaian atas IKU dapat diketahui dari sebagaimana perhitungan pada Tabel berikut:

**Tabel 3.20** Capaian IKU Persentase rekomendasi hasil audit yang ditindaklanjuti Ditjen Perkebunan terhadap total rekomendasi hasil audit yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal

Terwujudnya Birokrasi Direktorat Jenderal Perkebunan yang Efektif dan Efisien		
1-4 Persentase rekomendasi hasil audit yang ditindaklanjuti Ditjen Perkebunan terhadap total rekomendasi hasil audit yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal		
Target	Realisasi	Capaian
85,00%	86,36%	101,60%

Realisasi IKU adalah sebesar 86.36% (melampaui target 85.00%) sehingga capaiannya sebesar 101,60%. Dari 88 rekomendasi (hasil pemeriksaan sampai dengan tahun 2022) yang harus diselesaikan tindaklanjutnya, 76 rekomendasi telah dinyatakan selesai.

Perbandingan capaian dan target IKU tahunan sebelumnya dan Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.21** Capaian Persentase rekomendasi hasil audit yang ditindaklanjuti Ditjen Perkebunan terhadap total rekomendasi hasil audit yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal Tahun 2018 - 2022

	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
Target	95%	95%	-	80%	85%
Realisasi	94,47%	81,93%	-	82,33%	86,36%
Capaian	99,44%	86,24%	-	102,91%	101,60%

Sebagaimana ditunjukkan di atas, realisasi IKU tersebut tahun 2018 sampai dengan 2019 menurun, namun realisasi untuk tahun 2021 sampai dengan 2022 meningkat dan telah melampaui target tahunan yang ditetapkan, menunjukkan bahwa upaya perbaikan

senantiasa ditunjukkan untuk penyelesaian rekomendasi hasil audit Inspektorat Jenderal. Namun untuk tahun 2020, IKU ini tidak terdapat dalam perjanjian kinerja, sehingga data tidak dapat disajikan.

**Tabel 3.22** Capaian Persentase rekomendasi hasil audit yang ditindaklanjuti Ditjen Perkebunan terhadap total rekomendasi hasil audit yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal dibandingkan dengan Target Renstra

Target Renstra	Realisasi	Capaian
90%	86,36%	95,96%

Nilai realisasi IKU tersebut belum melampaui target akhir jangka menengah yang ditetapkan dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2020-2024. Untuk itu perlu adanya upaya yang lebih baik lagi pada periode selanjutnya dalam pencapaian target kinerja Persentase rekomendasi hasil audit yang ditindaklanjuti Ditjen Perkebunan terhadap total rekomendasi hasil audit yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal, dalam rangka mencapai target akhir renstra.

Beberapa hal yang menjadi tantangan dalam penyelesaian rekomendasi hasil audit Inspektorat Jenderal, diantaranya untuk rekomendasi terkait kerugian negara umumnya penyedia terkendala sejumlah dana yang harus dikembalikan, dan penyedia bisa mengembalikan dana dengan cara mencicil.

Upaya telah dilaksanakan untuk percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil audit Inspektorat Jenderal pada tahun 2022, diantaranya dengan melakukan surat-menyurat dan komunikasi intensif dengan Dinas di daerah dan penyedia.

Rencana aksi terkait pencapaian IKU ini di tahun mendatang adalah dengan melakukan upaya komunikasi intensif kepada Dinas di daerah dalam upaya percepatan penyelesaian rekomendasi.

#### Analisis Efisiensi atas Sumber Daya

Efisiensi ditunjukkan oleh realisasi belanja yang lebih kecil untuk pencapaian suatu output yang sama atau peningkatan capaian output dengan realisasi anggaran yang sama, sebagaimana dijelaskan dalam PMK Nomor

22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Berdasarkan data pagu-realisasi dan data capaian outputnya, maka diperoleh hasil persentase efisiensi belanja

TA 2022 dalam rangka mendukung sasaran terwujudnya Birokrasi Direktorat Jenderal Perkebunan yang Efektif dan Efisien adalah sebesar 6,03%, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

**Tabel 3.23** Efisiensi Penggunaan Anggaran untuk Mendukung Sasaran Terwujudnya Birokrasi Direktorat Jenderal Perkebunan yang Efektif dan Efisien

Rincian Output	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Efisiensi
Total	100	146.968.295.000	138.112.063.514	6,03%
Layanan BMN	100	5.926.600.000	5.867.257.121	1,00%
Layanan Hukum	100	4.660.000.000	4.604.042.966	1,20%
Layanan Hubungan Masyarakat	100	5.964.893.000	5.960.937.044	0,07%
Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	100	550.676.000	541.252.691	1,71%
Layanan Umum	100	27.844.507.000	26.581.918.427	4,53%
Layanan Data dan Informasi	100	5.656.054.000	5.588.771.804	1,19%
Layanan Perkantoran	100	82.010.381.000	74.965.716.456	8,59%
Layanan Sarana Internal	100	6.385.609.000	6.311.590.759	1,16%
Layanan Prasarana Internal	100	2.257.240.000	2.219.732.300	1,66%
Layanan Manajemen SDM	100	4.967.935.000	4.822.304.539	2,93%
Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	100	744.400.000	648.539.408	12,88%

## 2. Terkelolanya Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan yang Akuntabel dan Berkualitas

Pengelolaan anggaran meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring anggaran selama satu tahun anggaran yang selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada stakeholder. Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana

yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran belanja pemerintah menggunakan prinsip efektif, efisien, dan akuntabel dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. IKU yang mendukung pencapaian Sasaran Terkelolanya Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan yang Akuntabel dan Berkualitas dapat dilihat pada Tabel.

**Tabel 3.24** Capaian Sasaran Terkelolanya Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan yang Akuntabel dan Berkualitas

Kode	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
2-1	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan	85,00 Nilai	91,04 Nilai

**a. Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan**

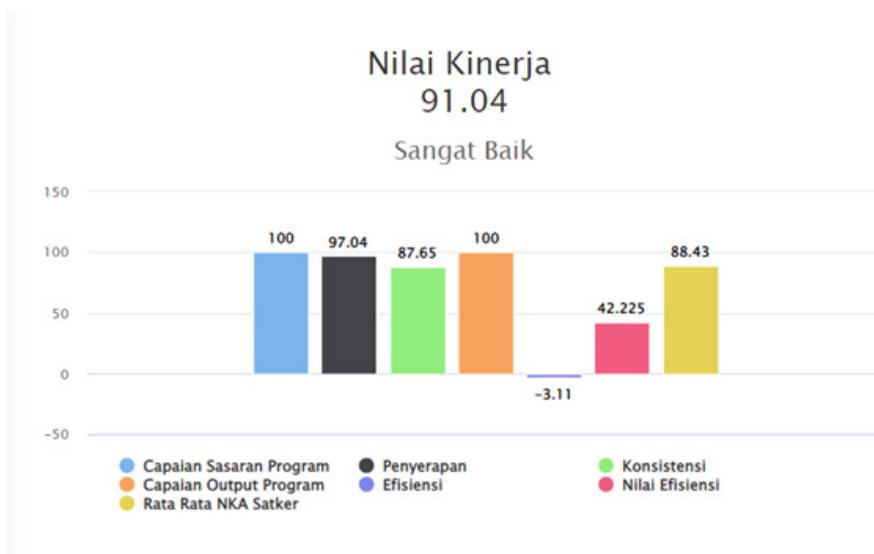
Kinerja Anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam dokumen anggaran berupa output dari suatu kegiatan atau hasil dari suatu program dengan kuantitas dan kualitas terukur. Monitoring Kinerja atas Penggunaan Anggaran adalah proses pemantauan yang berkesinambungan atas perkembangan capaian Kinerja anggaran yang telah ditetapkan dalam dokumen RKA. Monitoring Kinerja dilakukan dalam rangka pelaksanaan fungsi peningkatan kualitas penggunaan anggaran. Monitoring Kinerja dalam fungsi peningkatan kualitas bertujuan untuk memantau kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan kegiatan serta menganalisis faktor-faktor yang menjadi pendukung dan/atau kendala atas pelaksanaan RKA pada tahun anggaran berjalan sehingga capaian kinerja penggunaan anggaran pada tahun berjalan dapat ditingkatkan.

Evaluasi Kinerja anggaran adalah proses penilaian yang objektif dan sistematis atas Kinerja penggunaan anggaran dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam dokumen RKA. Evaluasi Kinerja dilakukan dalam rangka pelaksanaan

fungsi peningkatan kualitas dan fungsi akuntabilitas penggunaan anggaran. Evaluasi Kinerja dalam fungsi peningkatan kualitas bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menjadi pendukung dan/atau kendala atas pelaksanaan RKA tahun anggaran sebelumnya sebagai bahan penyusunan dan pelaksanaan RKA serta upaya peningkatan Kinerja penggunaan anggaran di tahun anggaran berikutnya.

Hasil dari monitoring dan evaluasi atas penggunaan anggaran dimaksud ditunjukkan dalam Nilai kinerja Anggaran. *Outcome* (dampak) dari tercapainya target Nilai Kinerja Anggaran adalah membaiknya secara keseluruhan kinerja anggaran dari sisi kesesuaian perencanaan dan penganggaran, efektifitas pelaksanaan kegiatan, kepatuhan terhadap regulasi dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

Perhitungan IKU didapat atas capaian nilai kinerja anggaran pada aplikasi SMART DJA. Periode pelaporan IKU adalah tahunan dan target yang ditetapkan untuk tahun 2022 sebesar 85,00. Adapun Rincian Capaian IKU dapat dilihat pada grafik berikut ini:



**Gambar 3.1** Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan

Target IKU tersebut untuk tahun 2022 adalah sebesar 85. Realisasi IKU tersebut tahun 2022, yaitu sebesar 91,04, telah melebihi target yang telah ditetapkan sebagaimana ditunjukkan sebagai berikut.

**Tabel 3.25** Capaian IKU Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan

Terkelolanya Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan yang Akuntabel dan Berkualitas		
2-1 Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan		
Target	Realisasi	Capaian
85	91,04	107,11%

Perkembangan capaian IKU tersebut tahun perbandingan yang ditunjukkan sebagai dari 2018 s.d. 2022 dapat diketahui dari berikut.

**Tabel 3.26** Capaian Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2018 - 2022

	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
Target	90%	92%	85	85	85
Realisasi	75%	84,45%	79,93	79,97	91,04
Capaian	83,33%	91,79%	94,04%	94,08%	107,11%

Berdasarkan tabel di atas, dapat kita lihat bahwa realisasinya berfluktuasi setiap tahun, namun capaiannya selalu meningkat, tertinggi pada tahun 2022 dengan realisasi sebesar 91,04 dan capaian sebesar 107,11%. Fluktuasi capaian IKU ini terutama disebabkan oleh perubahan formula perhitungan IKU yang

berbeda, sehingga data bahan perhitungan capaian IKU sesungguhnya tidak dapat diperbandingkan. Khusus pada tahun 2020 dan 2021, merupakan dampak pandemi COVID-19 yang membuat kebijakan sangat cepat berubah mengikuti perkembangan dampak penyebaran COVID 19.

**Tabel 3.27** Capaian Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan dibandingkan dengan Target Renstra

Target Renstra	Realisasi	Capaian
85	91,04	107,11%

Nilai realisasi IKU tersebut telah melampaui target akhir jangka menengah yang ditetapkan dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2020-2024.

Kendala dalam rangka pencapaian target kinerja:

- a) Perubahan kebijakan anggaran, mempengaruhi proses penyusunan kegiatan dan penganggaran TA 2022 dan juga dalam pelaksanaan kegiatan di tahun berjalan sehingga banyak terjadi penyesuaian perencanaan dan revisi DIPA atau Petunjuk Operasional Kegiatan. Seperti Revisi DIPA yang berulang kali karena refocusing anggaran yang mengakibatkan perencanaan penarikan dana tidak sejalan dengan realisasi anggaran. Selain itu juga revisi DIPA tidak selalu diikuti dengan revisi lembaran 3 DIPA.
- b) Tingginya capaian realisasi anggaran yang mencapai 97,04% sehingga mempengaruhi nilai efisiensi pada Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran di SMART. Dimana antara penyerapan dan efisiensi adalah hal yang kontraproduktif,

penyerapan terlalu tinggi maka efisiensi akan rendah dan apabila penyerapan rendah dengan capaian output tercapai maka efisiensi akan tinggi.

- c) Pencapaian target IKU yang baru dilaksanakan pada akhir tahun anggaran.
- d) Pada tahun 2022, terjadi kesalahan informasi kinerja pada aplikasi SMART berupa:
  - Indikator kinerja program eselon I lain yang masuk ke dalam indikator kinerja program Direktorat Jenderal Perkebunan
  - Terdapat indikator kinerja program yang tidak memiliki indikator sasaran program sehingga persentase realisasi indikator kinerja program secara default hanya 1%
  - Indikator Tingkat Kemanfaatan Sarana Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Perkebunan dan indikator pertumbuhan nilai ekspor perkebunan belum ada di aplikasi SMART

Walaupun penilaian Indikator tidak dilakukan

pada triwulanan, Satker masih dapat memantau capaian masing-masing indikator pada aplikasi SMART dan satker-satker tetap diminta mengantisipasi dan melakukan langkah-langkah peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran sejak awal tahun. Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan telah melakukan beberapa upaya untuk memaksimalkan capaian IKU ini diantaranya adalah sebagai berikut:

- a) Melakukan penyusunan RPD secara presisi
- b) Monitoring ketercapaian NKA pada masing-masing satker sepanjang tahun dengan cara berkoordinasi, asistensi/ melakukan pendampingan pengisian aplikasi SMART dan melakukan verifikasi pengisian dari satker-satker lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan
- c) Melakukan pemantauan pencapaian output kegiatan secara berkala
- d) Melakukan akselerasi penyerapan anggaran mulai sejak awal tahun anggaran
- e) Melakukan revisi RPD pada halaman III DIPA
- f) Melakukan realokasi anggaran untuk kegiatan yang sulit direalisasikan
- g) Melaksanakan rapat koordinasi Hasil Monev kinerja anggaran dan optimalisasi capaian kinerja tiap triwulan TA 2022.
- h) Berkoordinasi dengan pengelola aplikasi SMART dalam hal terkendala masalah aplikasi.
- i) Revisi informasi kinerja pada aplikasi SMART dilakukan melalui aplikasi KRISNA, mengingat data yang digunakan pada aplikasi SMART ditarik dari aplikasi

KRISNA. Perbaikan dilakukan dengan berkoordinasi dengan Biro Perencanaan untuk kemudian dilakukan perbaikan secara kolektif dengan eselon I lain lingkup Kementerian Pertanian. Perbaikan diajukan kepada Bappenas.

- j) Penyampaian peringkat capaian realisasi anggaran, SMART, IKPA pada seluruh satker berikut pemberian penghargaan satker yang berprestasi.

Untuk mengoptimalkan capaian tahun 2023, beberapa rencana aksi yang perlu dilaksanakan adalah:

- a) Menyiapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana dengan lebih akurat untuk memastikan nilai Konsistensi bernilai baik
- b) Melakukan pemantauan rencana, realisasi pelaksanaan anggaran, dan pencapaian output kegiatan secara berkala.
- c) Meminta dan mengingatkan satker untuk melakukan revisi halaman 3 DIPA pada setiap triwulan, sesuai batas waktu yang ditentukan
- d) Meminta satker disiplin dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan RPD yang telah direncanakan
- e) Meminta satker untuk mengisi aplikasi SMART secara rutin setiap bulan
- f) Verifikasi dan pendampingan pengisian SMART satker-satker lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan.

### **Analisis Efisiensi atas Sumber Daya**

Efisiensi ditunjukkan oleh realisasi belanja yang lebih kecil untuk pencapaian suatu output yang sama atau peningkatan capaian output dengan realisasi anggaran yang sama,

sebagaimana dijelaskan dalam PMK Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Berdasarkan data pagu-realisasi dan data capaian outputnya, maka

diperoleh hasil persentase efisiensi belanja TA 2022 dalam rangka mendukung sasaran terkelolanya anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan yang Akuntabel dan Berkualitas adalah sebesar 1,32%, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

**Tabel 3.28** Efisiensi Penggunaan Anggaran untuk Mendukung Sasaran Terkelolanya Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan yang Akuntabel dan Berkualitas

Rincian Output	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Efisiensi
Total	100	94.379.828.000	93.129.381.012	1,32%
Layanan Perencanaan dan Penganggaran	100	80.473.311.000	79.360.005.681	1,38%
Layanan Pemantauan dan Evaluasi	100	5.594.230.000	5.480.098.656	2,04%
Layanan Manajemen Keuangan	100	8.312.287.000	8.289.276.675	0,28%

## REALISASI ANGGARAN

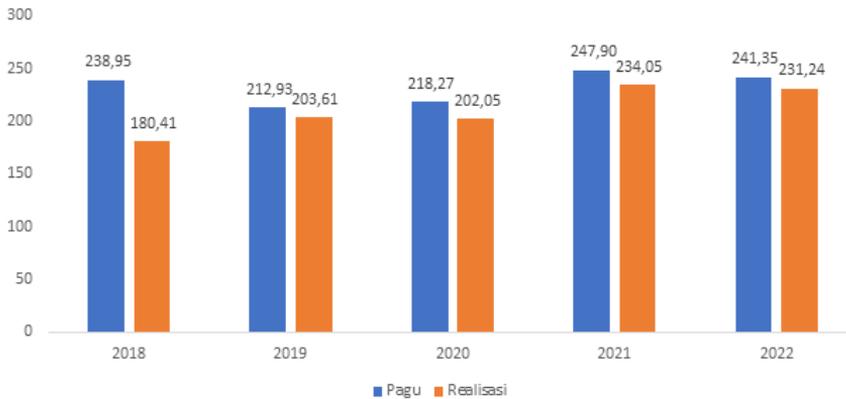
### 1. Realisasi Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun Anggaran 2022

Dalam upaya menjalankan tugas dan fungsinya, pada awal tahun 2022 Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan didukung oleh pagu anggaran yang telah disepakati dalam Perjanjian Kinerja sebesar Rp 262.390.079.000 untuk menjalankan Program Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan. Dalam perjalanannya, anggaran tersebut mengalami beberapa kali revisi/pemotongan pagu dalam rangka penanganan wabah penyakit mulut dan kuku (PMK), relokasi Badan Karantina

Pertanian, serta relokasi gaji. Anggaran tersebut dilakukan refocusing sebesar Rp. 21.041.956.000 sehingga pagu anggaran TA 2022 menjadi Rp. 241.348.123.000.

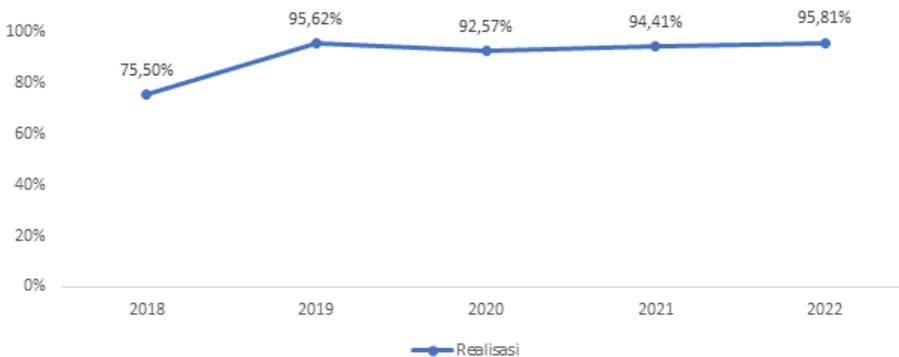
Berdasarkan data online monitoring SPAN (OMSPAN) Anggaran TA 2022, realisasi penyerapan anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan TA 2022 adalah sebesar Rp 231.241.444.526 atau mencapai 95,81% dari total pagu sebesar Rp 241.348.123.000. Penyerapan anggaran tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 1,4% dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 94,41%. Perkembangan realisasi penyerapan anggaran dalam periode 2018-2022 terlihat dalam grafik berikut:

Grafik Perkembangan Pagu dan Realisasi Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2018 s.d. 2022 (dalam miliar rupiah)



**Gambar 3.2** Perkembangan Pagu dan Realisasi Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan

Perkembangan Realisasi Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2018 s.d. 2022 (dalam persentase)



**Gambar 3.3** Tren Persentase Realisasi Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan

Dari grafik di atas dapat kita lihat perkembangan realisasi anggaran antara tahun 2018 sampai dengan 2022. Persentase penyerapan anggaran secara keseluruhan meningkat dari tahun 2018 (75,50%) ke tahun 2019 (95,62%;naik 20,12%), menurun pada tahun 2020 (92,57%;turun 3,05%), meningkat pada tahun 2021 (94,41%; naik 1,84%), dan meningkat lagi di tahun

2022 (95,81%; naik 1,40%). Pagu anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan tampak fluktuatif, sedangkan persentase penyerapan anggaran secara keseluruhan terus meningkat namun sempat menurun di tahun 2020 akibat adanya pandemi covid-19 yang menyebabkan pelaksanaan program dan kegiatan terhambat.

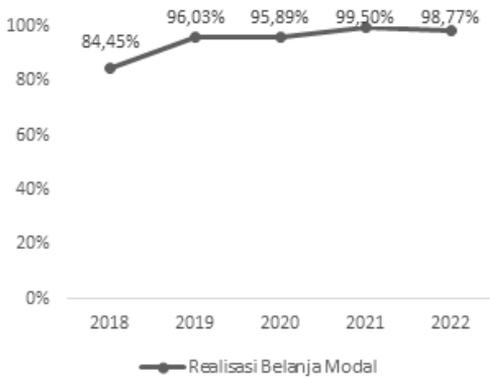
Langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran TA 2022 yang dilakukan guna meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran, antara lain:

- a. Melakukan revidi DIPA yang sudah disahkan, dan segera mengajukan usulan revisi DIPA jika diperlukan.
  - b. Melakukan percepatan persiapan pelaksanaan program/kegiatan, meliputi Penetapan petunjuk operasional kegiatan dan Penetapan Pejabat Perbendaharaan, yaitu: Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), dan Bendahara
  - c. Melakukan percepatan proses pengadaan barang/jasa (PBJ), meliputi:
    - 1) Penetapan Pejabat Pengadaan, Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dan/ atau kelompok kerja pengadaan;
    - 2) Penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) paling lambat 14 hari
  - d. Jika suatu kegiatan belanja sulit dilakukan maka anggaran belanja dimaksud segera direalokasi untuk belanja lain.
  - e. Melaksanakan belanja sesuai dengan rencana kebutuhan yang dituangkan dalam RKAKL/DIPA serta mempercepat penyelesaian tagihan dan pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM).
- 3) Pendaftaran kontrak ke KPPN paling lambat 5 hari kerja setelah kontrak ditandatangani.
- Belanja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal di mana persentase penyerapan masing-masing untuk tahun anggaran 2018 s.d. 2022 dapat ditunjukkan pada Tabel.

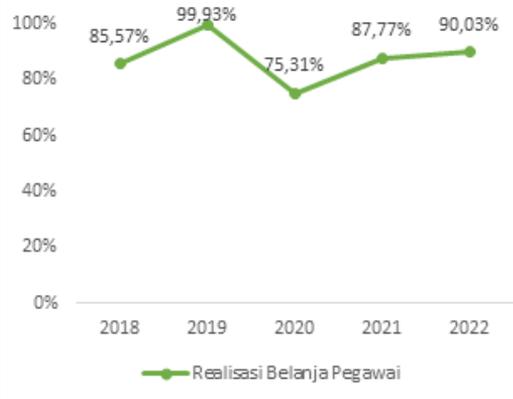
**Tabel 3.29** Realisasi Anggaran Tahun 2018-2022 per Jenis Belanja

Tahun	Jenis Belanja					
	Belanja Pegawai			Belanja Barang		
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
2018	33.637.412.000	28.784.053.149	85,57	190.974.286.000	139.509.641.105	73,05
2019	26.168.041.000	26.149.400.224	99,93	181.816.921.000	172.714.600.455	94,99
2020	32.740.593.000	24.658.565.989	75,31	169.693.443.000	162.207.489.107	95,59
2021	68.924.874.000	60.493.183.871	87,77	154.237.901.000	148.943.457.293	96,57
2022	61.639.009.000	55.495.016.257	90,03	171.771.540.000	167.906.338.175	97,75

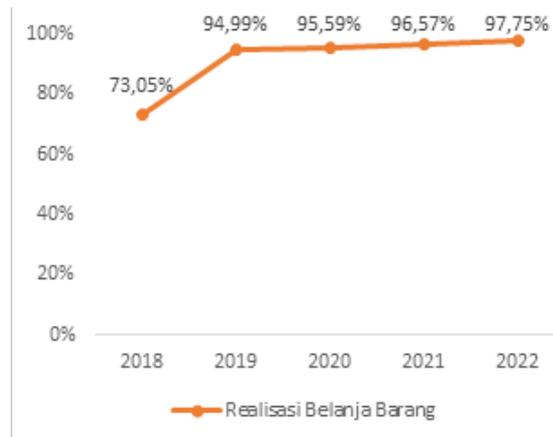
Tahun	Jenis Belanja		
	Belanja Modal		
	Pagu	Realisasi	%
2018	14.342.914.000	12.112.244.631	84,45
2019	4.943.768.000	4.747.296.200	96,03
2020	15.832.198.000	15.181.951.968	95,89
2021	24.738.392.000	24.615.061.636	99,50
2022	7.937.574.000	7.840.090.094	98,77



**Gambar 3.4** Tren Persentase Realisasi Belanja Modal



**Gambar 3.5** Tren Persentase Realisasi Belanja Pegawai



**Gambar 3.6** Tren Persentase Realisasi Belanja Barang

Sebagaimana pada tabel di atas, peningkatan dari tahun 2018 ke tahun 2019, menurun pada tahun 2020 dan kembali meningkat pada tahun 2021 serta mengalami kenaikan pada tahun 2022 ditunjukkan pada persentase penyerapan belanja pegawai. Persentase penyerapan belanja barang terus meningkat dari tahun 2018 ke tahun 2022, sementara persentase penyerapan belanja modal meningkat dari tahun 2018 ke 2019, menurun pada tahun 2020, kemudian meningkat pada tahun 2021, dan kembali turun pada tahun 2022. Dengan demikian, persentase penyerapan secara keseluruhan pada tahun 2022 Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan ditunjukkan meningkat dari tahun 2021 meskipun menurun pada penyerapan belanja modal.

Persentase penyerapan tertinggi pada tahun 2018 dan 2019 ada pada belanja

pegawai, pada tahun 2020 sampai dengan 2022 persentase penyerapan tertinggi ada pada belanja modal. Persentase penyerapan terendah pada tahun 2018 dan 2019 ada pada belanja barang, selama tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 adalah pada belanja pegawai.

## 2. Realisasi Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan TA 2022 per Rincian Output

Berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan, pada TA 2022 Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan melaksanakan 14 (empat belas) rincian output. Adapun realisasi anggaran dan fisik atas 14 (empat belas) rincian output tersebut pada TA 2022 ditunjukkan pada Tabel.

**Tabel 3.30** Realisasi Anggaran Tahun 2022 per Rincian Output

Rincian Output	Satuan	Target Volume	Realisasi Volume	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen. Perkebunan				100	241.348.123.000	231.241.444.526	95,81
Layanan BMN	Layanan	5	5	100	5.926.600.000	5.867.257.121	99,00
Layanan Hukum	Layanan	2	2	100	4.660.000.000	4.604.042.966	98,80
Layanan Hubungan Masyarakat	Layanan	1	1	100	5.964.893.000	5.960.937.044	99,93
Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Layanan	1	1	100	550.676.000	541.252.691	98,29
Layanan Umum	Layanan	5	5	100	27.844.507.000	26.581.918.427	95,47
Layanan Data dan Informasi	Layanan	1	1	100	5.656.054.000	5.588.771.804	98,81
Layanan Perkantoran	Layanan	5	5	100	82.010.381.000	74.965.716.456	91,41
Layanan Sarana Internal	Unit	5	5	100	6.385.609.000	6.311.590.759	98,84

Rincian Output	Satuan	Target Volume	Realisasi Volume	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
Layanan Prasarana Internal	Unit	2	2	100	2.257.240.000	2.219.732.300	98,34
Layanan Manajemen SDM	Orang	850	850	100	4.967.935.000	4.822.304.539	97,07
Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Dokumen	81	81	100	80.473.311.000	79.360.005.681	98,62
Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Dokumen	5	5	100	5.594.230.000	5.480.098.656	97,96
Layanan Manajemen Keuangan	Dokumen	5	5	100	8.312.287.000	8.289.276.675	99,72
Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	Layanan	1	1	100	744.400.000	648.539.408	87,12

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel, pagu anggaran terbesar terdapat pada rincian output Layanan Perkantoran. Dari 14 (empat belas) rincian output yang dilaksanakan langsung oleh Sekretariat Direktorat

Jenderal Perkebunan, penyerapan belanja tertinggi adalah pada Layanan Hubungan Masyarakat (99,93%), sementara penyerapan belanja terendah adalah pada Layanan Penyelenggaraan Kearsipan (87,12%).



## **IV. PENUTUP**

**KESIMPULAN**



## IV. PENUTUP

### KESIMPULAN

Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan merupakan salah satu unit eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Perkebunan yang memiliki tugas untuk memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkebunan. Untuk melaksanakan tugas tersebut Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan menyelenggarakan berbagai fungsi yang dijalankan oleh Bagian Umum, Kelompok Perencanaan, Kelompok Keuangan, Kelompok Organisasi, Kepegawaian, Hukum dan Hubungan Masyarakat, dan Kelompok Data, Evaluasi, dan Pelaporan. Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan memiliki peran yang berkaitan dengan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara, penyempurnaan organisasi dan kepegawaian, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan hubungan masyarakat serta informasi publik, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan, dan pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Jenderal Perkebunan.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban dan komitmen akan akuntabilitas kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan menyusun Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2022. Laporan Kinerja (LAKIN) Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2022 disusun

sebagai perwujudan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pencapaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2022 telah sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja antara Direktur Jenderal Perkebunan dengan Sekretaris Direktorat Jenderal Perkebunan, di mana dari total 6 IKU, seluruhnya telah mencapai target yang telah ditetapkan. Keberhasilan kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Mencapai nilai 35,00 dari target 32,72 pada IKU Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Perkebunan
2. Memperoleh nilai 3,13 skala likert (1-4) dari target 3,00 pada IKU Tingkat Kepuasan unit Eselon II lingkup Ditjen Perkebunan terhadap layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan yang diberikan
3. Mencapai nilai 3,774 dari target 3,00 pada IKU Level maturitas penyelenggaraan SPIP Ditjen Perkebunan
4. Memperoleh realisasi 87,50% dari target 80,00% untuk IKU Persentase rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian terkait Ditjen Perkebunan yang ditindaklanjuti Ditjen Perkebunan

5. Memperoleh realisasi 86,36% dari target 85,00% untuk IKU Persentase rekomendasi hasil audit yang ditindaklanjuti Ditjen Perkebunan terhadap total rekomendasi hasil audit yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal
6. Mencapai nilai 91,04 dari target 85,00 untuk IKU Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan

Laporan Kinerja (LAKIN) Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2022 merupakan hasil Evaluasi kinerja selama satu tahun anggaran yang berisikan tentang kegiatan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan teknis dan administrasi, yang tertuang dalam perjanjian kinerja dan indikator kinerja utama Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan. Hasil evaluasi tersebut diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif dan transparan atas capaian kinerja dan strategi dalam mencapai tujuan organisasi, serta bagi seluruh jajaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan dapat menjadi umpan balik guna peningkatan kinerja organisasi pada periode mendatang. Hasil dari laporan kinerja organisasi dapat dijadikan sebagai bahan kajian untuk mengambil kebijakan bagi pemangku kepentingan untuk peningkatan kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan di tahun-tahun mendatang.

Meskipun realisasi seluruh IKU telah mencapai targetnya, Sekretariat Direktorat Jenderal

Perkebunan secara berkelanjutan berusaha mengatasi segala permasalahan yang terdapat pada pencapaian setiap IKU untuk terus meningkatkan kinerja secara optimal. Strategi yang akan ditempuh dalam rangka meningkatkan capaian kinerja pada tahun mendatang diantaranya adalah:

1. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses bisnis internal.
2. Melakukan kegiatan pemantauan secara berkala dan terpadu, serta koordinasi antar bagian/kelompok untuk melaksanakan kegiatan, sehingga kegiatan dapat berjalan secara efektif dan efisien.
3. Membuat rencana operasional kegiatan dengan membuat skala prioritas tiap-tiap kegiatan
4. Perencanaan kegiatan dilakukan seoptimal mungkin dengan memperhatikan jumlah anggaran yang tersedia.
5. Perlu adanya penataan pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan pegawai dan peta jabatan, sehingga kualitas kerja dapat lebih optimal.
6. Perbaikan organisasi dan SDM yang berkolaboratif berbasis digital.
7. Digitalisasi layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan secara optimal.



# LAMPIRAN





**KEMENTERIAN PERTANIAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN**

KANPUS KEMENTERIAN PERTANIAN JALAN HARSONO RM NO. 3,  
GEDUNG C PASAR MINGGU, JAKARTA 12550  
TELEPON (021) 7815380 - 4, FAKSIMILI (021) 7815486 - 7815586  
WEBSITE : <http://ditjenbun.pertanian.go.id>

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Heru Tri Widarto  
Jabatan : Sekretaris Ditjen. Perkebunan  
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Andi Nur Alam Syah  
Jabatan : Direktur Jenderal Perkebunan  
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2022

Pihak Kedua

Andi Nur Alam Syah

Pihak Pertama

Heru Tri Widarto

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN**

No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Birokrasi Direktorat Jenderal Perkebunan yang Efektif dan Efisien	1-1	Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Perkebunan	32.72 Nilai
		1-2	Tingkat kepuasan unit Eselon II di lingkup Ditjen Perkebunan terhadap layanan Sekreriat Direktorat Jenderal Perkebunan yang diberikan	3.00 Skala Likert (1-4)
		1-3	Level maturitas penyelenggaraan SPIP Ditjen. Perkebunan	3.00 Level
		1-4	Persentase rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian terkait Ditjen. Perkebunan yang ditindaklanjuti Ditjen. Perkebunan	80.00 %
		1-5	Persentase rekomendasi hasil audit yang ditindaklanjuti Ditjen. Perkebunan terhadap total rekomendasi hasil audit yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal	85.00 %
2	Terkelolanya Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan yang Akuntabel dan Berkualitas	2-1	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan	85.00 Nilai

**KEGIATAN**

1 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen. Perkebunan

**ANGGARAN**

Rp. 183.337.987.000

Jakarta, Desember 2022

Pihak Kedua



Andi Nur Alam Syah

Pihak Pertama



Heru Tri Widarto



**KEMENTERIAN PERTANIAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN**

KANPUS KEMENTERIAN PERTANIAN JALAN HARSONO RM NO. 3,  
GEDUNG C PASAR MINGGU, JAKARTA 12550  
TELEPON (021) 7815380 - 4, FAKSIMILI (021) 7815486 - 7815586  
WEBSITE : <http://ditjenbun.pertanian.go.id>

**SURAT PERSETUJUAN  
HASIL PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI  
UNIT KERJA DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN  
Nomor: 6058 /OT.240/E.1/04/2022**

Memperhatikan hasil reviu atas Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Unit Kerja Direktorat Jenderal Perkebunan, dengan ini saya menyetujui hasil penilaian mandiri sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Reviu Hasil PMPRB Unit Kerja Direktorat Jenderal Perkebunan.

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 26 April 2022

a.n. Direktur Jenderal Perkebunan  
Sekretaris,



Heru Tri Widarto, S.Si, M.Sc.  
NIP. 197204121999031004



**KEMENTERIAN PERTANIAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN**

KANPUS KEMENTERIAN PERTANIAN JALAN HARSONO RM NO. 3,  
GEDUNG C PASAR MINGGU, JAKARTA 12550  
TELEPON (021) 7815380 - 4, FAKSIMILI (021) 7815486 - 7815586  
WEBSITE : <http://ditjenbun.pertanian.go.id>

**BERITA ACARA PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI  
UNIT KERJA DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN**

Nomor: 5875 /OT.240/E.1/04/2022

Pada hari ini, Jumat tanggal 22 bulan April tahun 2022, kami yang bertanda tangan di bawah ini Kelompok Kerja Reformasi Birokrasi (POKJA RB) lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan, dan Tim Assessor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi tahun 2022, telah melaksanakan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dengan hasil sebagai berikut:

1. Bahwa proses PMPRB telah berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020, tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
2. Bahwa hasil PMPRB unit kerja Direktorat Jenderal Perkebunan sebagaimana tertuang dalam Lembar Kerja Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (LKE-RB), yang ditandatangani bersama Tim POKJA RB unit kerja Direktorat Jenderal Perkebunan dengan Tim Assessor Inspektorat Jenderal.

Berita Acara PMPRB ini dibuat dengan sebenar-benarnya, untuk selanjutnya dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tim POKJA RB Ditjen Perkebunan

1. Sukim Supandi, .Sos,MM .....
2. Yanuar Arianto, S.TP, MM .....
3. Hadi Dafenta, SH, M.Sc .....
4. Gento Widayanto,S.Sos,MM .....
5. Eva Lizarmi, SP .....
6. Romauli Siagian, SP, M.Sc .....
7. Agnes V. Silalahi, SP,M.Sc .....
8. Dhani Gartina, S.Kom,MT .....
9. Muh. Salman Ahyar S.Si .....

Tim Assessor Inspektorat Jenderal

1. Ir. Dahono, M.Si .....
2. Siti Rohani, SP, MM .....
3. Hasan Subkhie, S.Pt, MP .....
4. Herlina Dwi Astuti, SH, MH .....
5. Nurullah, ST .....
6. Firmansyah, SP, MM .....
7. Drajat Jantika, SP .....
8. Nurul Hasanah, SP .....
9. M. Ikhsan Nugroho S, S.Si .....
10. Murni Anggraeni, SE,M.Si .....

(Berita acara ini dilampiri dengan LKE PMPRB, Absensi, dan dokumentasi/foto)

**PEMANTAUAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI LHP BPK-RI  
SATKER DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN  
POSISI : 31 DESEMBER 2022**

NO	Provinsi	No dan Tanggal LHP	Jenis Audit	Uraian Audit	Jumlah Rekomendasi				Tindak Lanjut				SISA				Keterangan
					Satker			Eselon I	Satker			Eselon I	Satker			Eselon I (6-9)	
					Adm/ Teknis	KN	Nilai Temuan		Adm/ Teknis	KN	Nilai Temuan		Adm/ Teknis	KN	Nilai Temuan		
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
1	DKI Jakarta Ditjenbun	36/LHP/XV/12/2020, tanggal 30 Desember 2020	PDTT LHP Belanja Penanganan COVID	Anggaran Penanganan Pandemi COVID-19 Sebesar Rp975.203.168.660,00 Belum Menggunakan Klasifikasi Akun Khusus COVID-19  Realisasi Kegiatan Penanganan COVID-19 pada Ditjenbun Senilai Rp4.518.014.717,00 Belum Didukung Dokumen Pertanggungjawaban dan Monitoring Pelaporan dan Pertanggungjawaban Kegiatan Ketersediaan Pangan Belum Memadai	-	-	0,00	1	-	-	0,00	1	-	-	0,00	-	Ditjenbun telah menginstruksikan Koordinator Perencanaan agar melakukan kodefikasi akun sesuai klasifikasi akun Covid
					-	-	0,00	2	-	-	0,00	2	-	-	0,00	-	Ditjenbun telah melakukan pemantauan perkembangan pelaporan pertanggungjawaban penanganan Covid dan telah menginstruksikan kepada PPK Satker lingkup Ditjenbun
<b>JUMLAH</b>					-	-	<b>0,00</b>	<b>3</b>	-	-	<b>0,00</b>	<b>3</b>	-	-	<b>0,00</b>	-	
2	DKI Jakarta Ditjenbun	9b/LHP/XVII/05/2022, tanggal 27 Mei 2022	LK 2020	Pengadaan benih perkebunan pada Ditjen Perkebunan tidak didukung sertifikasi mutu benih minimal sebesar Rp70.005.510.459,00.  Hasil Sertifikat dan uji mutu pupuk pada Ditjen Perkebunan Tidak Sesuai Pedoman Teknis Minimal Sebesar Rp86.618.220.535,00.  Pelaksanaan Pengadaan Bantuan Pemerintah Berupa Pupuk Melalui E-Purchasing Katalog Sektorial Senilai Rp665.097.215.055,00 Belum Sesuai Ketentuan  Seluruh Belanja Bantuan untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Permda pada Ditjen Perkebunan Belum Didukung SK CPCL.	-	-	0,00	2	-	-	0,00	2	-	-	0,00	-	Ditjenbun telah menetapkan Pedum Teknis dan telah berkoordinasi dengan Ir-3 Itjentan agar melakukan revisi belanja 536 Rp70.005.510.459,00
					-	-	0,00	2	-	-	0,00	2	-	-	0,00	-	Ditjenbun telah menetapkan Pedum Teknis dan telah memberikan sanksi surat teguran kepada PPK pada 25 Satker lingkup Ditjenbun
					-	-	0,00	1	-	-	0,00	1	-	-	0,00	-	Ditjenbun telah memberikan sanksi surat teguran kepada 6 PPK antara lain PPK Dirat Tahungar, PPK Dirat tansimpah, PPK Satker Distan Malu, PPK Satker Distnbun Aceh, PPK BBPPTP Surabaya dan PPK Satker Disbun Jambi
					-	-	0,00	2	-	-	0,00	2	-	-	0,00	-	Ditjenbun telah melakukan pemutakhiran Juknis 2022 dan telah menginstruksikan PPK Satker BBPPTP Medan dan Surabaya dan Tim Teknis Perbenihan Ditjenbun Pusat

NO	Provinsi	No dan Tanggal LHP	Jenis Audit	Uraian Audit	Jumlah Rekomendasi				Tindak Lanjut				SISA				Keterangan
					Satker			Eselon I	Satker			Eselon I	Satker			Eselon I (6-9)	
					Adm/ Teknis	KN	Nilai Temuan		Adm/ Teknis	KN	Nilai Temuan		Adm/ Teknis	KN	Nilai Temuan		
				Proses Penganggaran pada RKA-K/L Direktorat Jenderal Perkebunan Tidak Sesuai Pedoman	-	-	0,00	3	-	-	0,00	2	-	-	0,00	1	Ditjenbun telah berkoordinasi dengan Ir-3 Itjentan agar melakukan reuiu atas kekurang volume benih Rp137.735.500,00.dan telah menetapkan SBM serta Pedum Teknis lingkup Ditjenbun.
				Pengelolaan Persediaan Benih pada Kegiatan Nursei di Ditjen Perkebunan Tidak Tertib.	-	-	0,00	3	-	-	0,00	2	-	-	0,00	1	Ditjenbun telah berkoordinasi dengan Ir-3 Itjentan agar melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap persediaan dan telah menyusun SOP penatausahaan persediaan.
<b>JUMLAH</b>					-	-	<b>0,00</b>	<b>13</b>	-	-	<b>0,00</b>	<b>11</b>	-	-	<b>0,00</b>	<b>2</b>	
<b>TOTAL REKOMENDASI</b>								<b>16</b>				<b>14</b>					
<b>PRESENTASE TINDAK LANJUT REKOMENDASI</b>												<b>87,50</b>					

Keterangan :  
rumus penilaian tindak lanjut rekomendasi

$$\frac{\text{(JML REKOMENDASI)}}{\text{(JML TL REKOMENDASI)}} \times 100 \%$$

**PEMANTAUAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI LHA ITJEN KEMENTERIAN PERTANIAN  
SATKER DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN  
POSISI : 31 DESEMBER 2022**

NO	Provinsi	No dan Tanggal LHP	Jenis Audit	Uraian Audit	Jumlah Rekomendasi				Tindak Lanjut				SISA				Keterangan
					Satker			Eselon I	Satker			Eselon I	Satker			Eselon I (6-9)	
					Adm/ Teknis	KN	Nilai Temuan		Adm/ Teknis	KN	Nilai Temuan		Adm/ Teknis	KN	Nilai Temuan		
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
1	D.K.I Jakarta Ditjenbun Pusat	R.13/PW.130/G.4/01/2022, tanggal 24 Januari 2022	Audit Kegiatan Stragetis	Laporan Hasil Audit Kegiatan Strategis Lingkup Ditjen Perkebunan Di Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2021	-	-	0,00	7	-	-	0,00	7	-	-	0,00	-	Pembahasan tanggal 1 November 2022 antara Ditjenbun dan Ir-3 Itjentan (tuntas)
<b>JUMLAH AUDIT KEGITAN STRATEGIS</b>					-	-	<b>0,00</b>	<b>7</b>	-	-	<b>0,00</b>	<b>7</b>	-	-	<b>0,00</b>	-	
2	D.K.I Jakarta	R.144/PW.130/G.4/05/2022, tanggal 31 Mei 2022	Audit Kinerja	Laporan Hasil Audit Kinerja/Ketaatan Atas Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Pada Satker Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun Anggaran 2021 dan 2022	-	1	120.000,00	13	-	1	120.000,00	13	-	-	0,00	-	Pembahasan tanggal 1 November 2022 antara Ditjenbun dan Ir-3 Itjentan (tuntas)
						1	5.887.500,00			1	5.887.500,00						
<b>JUMLAH AUDIT KINERJA</b>					-	<b>2</b>	<b>6.007.500,00</b>	<b>13</b>	-	<b>2</b>	<b>6.007.500,00</b>	<b>13</b>	-	-	<b>0,00</b>	-	
3	D.K.I Jakarta Pusat	R.182/PW.180/G.4/06/2022, tanggal 27 Juni 2022	Audit Pengawasan	Laporan Hasil Pengawasan SPI Kegiatan Percepatan Proses Hibah Banpem Yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda Melalui Aplikasi BAST 526 Pada Satker Lingkup Ditjen Perkebunan Wilayah Barat.	-	-	0,00	3	-	-	0,00	3	-	-	0,00	-	Dirjenbun telah bersurat kepada Kabag Umum Nomor : 14.255/PW.180/E1/09/2022, tanggal 22 September 2022
4	DKI Jakarta- Ditjenbun Pusat	R.259/PW.180/G.4/08/2022, tanggal 8 Agustus 2022	Audit Pengawasan	Laporan Hasil Pengawasan SPIP Kegiatan Pembangunan Nursery Modern (SBSN) Pada Direktorat Perkebunan Perkebunan Tahun 2022	-	-	0,00	5	-	-	0,00	-	-	-	0,00	5	Dirjenbun telah bersurat kepada Direktur Perbenihan Perkebunan Nomor : 14.281/PW.180/E1/09/2022, tanggal 22 September 2022
<b>JUMLAH AUDIT PENGAWALAN</b>					-	-	<b>0,00</b>	<b>8</b>	-	-	<b>0,00</b>	<b>3</b>	-	-	<b>0,00</b>	<b>5</b>	
5	DKI, Jakarta Ditjenbun	R.86/PW.110/G.4/03/2022 Tanggal 30 Maret 2022	Audit BMN	Laporan Hasil Reviu Revisi Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKMBN) TA. 2022 Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan	-	-	0,00	1	-	-	0,00	1	-	-	0,00	-	Pembahasan tanggal 1 November 2022 antara Ditjenbun dan Ir-3 Itjentan (tuntas)
6	DKI, Jakarta Ditjenbun	R.183/PW.180/G.4/06/2022 Tanggal 22 Juni 2022	Audit BMN	Laporan Hasil Pengawasan SPI Kegiatan Percepatan Proses Hibah Banpem Yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda (BAST Banpem 526) TA 2022 Pada Satker Lingkup Ditjen Perkebunan Wilayah Timur	-	-	0,00	4	-	-	0,00	-	-	-	0,00	4	Dirjenbun telah bersurat kepada Kabag Umum dengan surat nomor : 19.337/PW.180/E1/11/2022 tanggal 28 November 2022
<b>JUMLAH UDIT BMN</b>					-	-	<b>0,00</b>	<b>5</b>	-	-	<b>0,00</b>	<b>1</b>	-	-	<b>0,00</b>	<b>4</b>	
7	D.K.I Jakarta Pusat	R.134/PW.110/G.4/05/2022, tanggal 10 Mei 2022	Audit Pengadaan	Laporan Hasil Reviu Dokumen Pengadaan Pembeku Lateks Wilayah Kalimantan Pada Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan - Ditjen Perkebunan Tahun 2022	-	-	0,00	2	-	-	0,00	2	-	-	0,00	-	Dalam LHR No. R.134/PW.110/G.4/05/2022, tanggal 10 Mei 2022 oleh Dirat PPHP telah ditindaklanjuti
<b>JUMLAH AUDIT PENGADAAN</b>					-	-	<b>0,00</b>	<b>2</b>	-	-	<b>0,00</b>	<b>2</b>	-	-	<b>0,00</b>	-	

NO	Provinsi	No dan Tanggal LHP	Jenis Audit	Uraian Audit	Jumlah Rekomendasi				Tindak Lanjut				SISA				Keterangan
					Satker			Eselon I	Satker			Eselon I	Satker			Eselon I (6-9)	
					Adm/ Teknis	KN	Nilai Temuan		Adm/ Teknis	KN	Nilai Temuan		Adm/ Teknis	KN	Nilai Temuan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
8	D.K.I Jakarta Pusat	R.065/PW.110/G.4/03/2022, tanggal 10 Maret 2022	Audit Collecting Fee	Laporan Hasil Reviu RKA-K/L Revisi DIPA TA 2021 Lingkup Ditjen Perkebunan (Perbenihan)	-	-	0,00	3	-	-	0,00	3	-	-	0,00	-	Pembahasan tanggal 1 November 2022 antara Ditjenbun dan Ir-3 ltjentan (tuntas)
<b>JUMLAH AUDIT COLLECTING FEE</b>					-	-	<b>0,00</b>	<b>3</b>	-	-	<b>0,00</b>	<b>3</b>	-	-	<b>0,00</b>	-	
9	D.K.I Jakarta Pusat	R.34/PW.140/G.4/02/2022, tanggal 14 Februari 2022	Reviu LK	Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan Semester II Tahun 2021 Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Ditjen Perkebunan Periode 31 Desember 2021.	-	-	0,00	12	-	-	0,00	12	-	-	0,00	-	Pembahasan tanggal 1 Juli 2022 antara Ditjenbun dan Ir-3 ltjentan (tuntas)
<b>JUMLAH REVIU LK</b>					-	-	<b>0,00</b>	<b>12</b>	-	-	<b>0,00</b>	<b>12</b>	-	-	<b>0,00</b>	-	
10	D.K.I Jakarta Pusat	R.128/PW.110/G.4/04/2022, tanggal 22 April 2022	Reviu DIPA	Laporan Hasil Reviu Revisi DIPA Linbgkup Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2022 : - Dirat Tansimpah : 1 Rekom - Dirat Perlindungan : 2 Rekom - Dirat Perbenihan : 8 Rekom - Dirat PPHP : 4 Rekom - Dirat Tanhungan : 5 Rekom - Sekretariat : 1 Rekom	-	-	0,00	21	-	-	0,00	21	-	-	0,00	-	Pembahasan tanggal 1 Juli 2022 antara Ditjenbun dan Ir-3 ltjentan (tuntas)
<b>JUMLAH REVIU DIPA</b>					-	-	<b>0,00</b>	<b>21</b>	-	-	<b>0,00</b>	<b>21</b>	-	-	<b>0,00</b>	-	
11	D.K.I Jakarta Pusat	R.25/PW.160/G.4/02/2022, tanggal 10 Februari 2022	Reviu LAKIN	Laporan Hasil Reviu Atas Draft Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2021	-	-	0,00	16	-	-	0,00	16	-	-	0,00	-	Pembahasan tanggal 1 Juli 2022 antara Ditjenbun dan Ir-3 ltjentan (tuntas)
<b>JUMLAH REVIU LAKIN</b>					-	-	<b>0,00</b>	<b>16</b>	-	-	<b>0,00</b>	<b>16</b>	-	-	<b>0,00</b>	-	
	DKI Jakarta	R.125/PW.170/G.4/04/2022, tanggal 27 April 2022	Evaluasi SAKIP	Laporan Hasil Evaluasi Atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pada Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2021	-	-	0,00	3	-	-	0,00	-	-	-	0,00	3	Dirjenbun telah bersurat kepada Koordinator Data Evaluasi dan Pelaporan Nomor :S.327/PW.170/E1/06/2022 tanggal 30 Juni 2022
<b>JUMLAH</b>					-	-	<b>0,00</b>	<b>3</b>	-	-	<b>0,00</b>	-	-	-	<b>0,00</b>	<b>3</b>	
<b>TOTAL REKOMENDASI</b>								<b>88</b>				<b>76</b>					
<b>PRESENTASE TINDAK LANJUT REKOMENDASI</b>												<b>86,36</b>					

Keterangan :

rumus penilaian tindak lanjut rekomendasi

(JML REKOMENDASI)

x

100 %

(JML TL REKOMENDASI)

**NILAI KINERJA ANGGARAN PER SATKER LINGKUP DITJEN PERKEBUNAN**

No.	Satuan Kerja	Kinerja	Penyerapan	Konsistensi	CRO	Efisiensi	Nilai Efisiensi
1	DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAWA BARAT (DK)	99,81	99,72	99,09	100	20	100
2	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN KOLAKA	99,81	99,42	99,27	100	20	100
3	DINAS PERKEBUNAN PROV SUMATERA UTARA (DK)	99,7	98,72	99,01	100	20	100
4	DINAS PERTANIAN KAB. TANA TORAJA	99,56	97,02	99,19	100	20	100
5	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT (DK)	99,47	99,73	97,21	100	20	100
6	BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN (BBP2TP) AMBON	99,2	98,08	96,65	100	20	100
7	DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH (TP)	98,88	92,86	97,65	100	20	100
8	BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN (BBP2TP) MEDAN	98,68	96,46	94,65	100	20	100
9	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (DK)	98,65	95,89	96,96	100	19,45	98,62
10	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA (DK)	98,64	100	92,54	100	20	100
11	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH (DK)	97,37	99,49	97,87	100	16,94	92,35
12	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT (TP)	96,56	99,13	81,55	100	20	100
13	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN PROVINSI PAPUA (DK)	96,55	100	81,04	100	20	100
14	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR (DK)	96,41	99,64	95,98	100	16,05	90,12
15	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI PAPUA BARAT (DK)	96,35	99,59	80,18	100	20	100
16	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KAB. KOLAKA UTARA	95,67	99,15	94,84	100	15,37	88,43
17	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI PAPUA BARAT (TP)	95,15	99,92	73,37	100	20	100
18	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU (TP)	95,1	92,53	96,68	100	15,01	87,53
19	DINAS PERTANIAN PROVINSI BANTEN (DK)	93,09	99,87	62,12	100	20	100
20	DINAS PERTANIAN PROVINSI MALUKU UTARA (DK)	92,81	100	60,5	100	20	100
21	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KAB. TOLI-TOLI	92,78	99,47	60,62	100	20	100
22	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA (TP)	92,51	80,31	69,34	100	20	100
23	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH (TP)	91,13	98,62	98,05	100	8,27	70,69
24	DINAS PERTANIAN PROVINSI MALUKU UTARA (TP)	91,02	99,84	82,09	100	12,02	80,05
25	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI SULAWESI SELATAN (TP)	89,69	99,36	99,95	100	5,68	64,19
26	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU (DK)	89,55	91,92	93,71	100	8,08	70,2
27	DINAS PERTANIAN PROVINSI BANTEN (TP)	89,42	99,72	42,03	100	20	100
28	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN PROVINSI PAPUA (TP)	89,41	98,64	42,54	100	20	100
29	DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN	89,19	96,29	90,04	100	7,92	69,8
30	DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH (DK)	88,61	99,79	97,68	100	4,68	61,71
31	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (TP)	87,97	94,94	95,29	100	5,06	62,64
32	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI BALI (DK)	87,95	96,17	99,38	100	3,83	59,57
33	DINAS PERKEBUNAN & HORTIKULTURA PROP. SULAWESI TENGGARA (TP)	87,79	99,68	79,08	100	8,29	70,72
34	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI BALI (TP)	87,78	96,55	99,71	100	3,45	58,63
35	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT (TP)	87,29	96,71	97,56	100	3,29	58,22
36	BALAI PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN PONTIANAK	86,83	93,92	85,56	100	6,08	65,19
37	DINAS PERKEBUNAN PROVINSI LAMPUNG (DK)	86,72	98,26	99,69	100	1,74	54,35
38	DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI BENGKULU (TP)	86,68	93,43	89,68	98,94	5,54	63,84
39	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN LUWU TIMUR	86,21	99,99	94,9	100	2,01	55,02
40	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI	86,19	99,13	99,74	100	0,87	52,17
41	DINAS PERTANIAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (TP)	86,16	98,57	97,69	100	1,43	53,57
42	DINAS PERKEBUNAN PROVINSI SULAWESI BARAT (DK)	86,09	98,6	97,4	100	1,4	53,49
43	DINAS PERKEBUNAN PROPINSI JAMBI (TP)	85,83	99,29	98,31	100	0,71	51,76

No.	Satuan Kerja	Kinerja	Penyerapan	Konsistensi	CRO	Efisiensi	Nilai Efisiensi
44	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI SULAWESI SELATAN (DK)	85,82	99,81	99,98	100	0,19	50,48
45	DINAS PERKEBUNAN PROVINSI LAMPUNG (TP)	85,75	99,1	97,18	100	0,9	52,26
46	DINAS PERKEBUNAN PROPINSI JAMBI (DK)	85,73	99,7	99,14	100	0,3	50,74
47	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT (DK)	85,73	99,85	99,66	100	0,15	50,37
48	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN WAJO	85,72	99,96	100	100	0,04	50,1
49	DINAS PERTANIAN PROVINSI GORONTALO (DK)	85,67	99,98	99,76	100	0,02	50,04
50	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TENGAH (TP)	85,63	99,06	96,41	100	0,94	52,35
51	DINAS PERTANIAN PROVINSI GORONTALO (TP)	85,58	99,97	99,23	100	0,03	50,08
52	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TENGAH (DK)	85,56	97,09	89,38	100	2,91	57,27
53	DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TIMUR (TP)	85,51	98,94	95,34	100	1,06	52,65
54	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH (DK)	85,46	99,97	98,55	100	0,03	50,08
55	DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI BENGKULU (DK)	85,35	99,52	96,42	100	0,48	51,2
56	DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TIMUR (DK)	85,29	99,7	96,71	100	0,3	50,76
57	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR (TP)	85,26	99,91	97,25	100	0,09	50,23
58	BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN (BBP2TP) SURABAYA	85,12	96,52	97,68	100	0,25	50,62
59	DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI SUMATERA BARAT (TP)	84,46	94,7	75,21	100	5,3	63,24
60	DINAS PERTANIAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (DK)	84,31	98,31	86,61	100	1,69	54,22
61	DINAS PERKEBUNAN & HORTIKULTURA PROP. SULAWESI TENGGARA (DK)	84,2	99,67	92,77	99,7	-0,04	49,91
62	DINAS PERKEBUNAN PROVINSI SULAWESI BARAT (TP)	84,19	98,66	87,16	100	1,34	53,34
63	DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR (TP)	84,07	98,03	84,36	100	1,97	54,92
64	DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR (DK)	83,81	99,58	88,22	100	0,42	51,04
65	DINAS PERKEBUNAN PROVINSI RIAU (DK)	83,58	99,59	86,98	100	0,41	51,02
66	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH (TP)	83,33	99,76	86,19	100	0,24	50,59
67	DINAS PERKEBUNAN PROVINSI RIAU (TP)	83,3	96,54	75,09	100	3,46	58,64
68	DINAS PERKEBUNAN PROVINSI SUMATERA SELATAN (TP)	83,27	98,32	79,85	100	1,96	54,9
69	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROV. D.I. YOGYAKARTA (DK)	83,25	99,82	85,93	100	0,18	50,45
70	DINAS PERTANIAN KABUPATEN BANDUNG	83,21	95,77	71,95	100	4,23	60,57
71	DINAS PERKEBUNAN PROPINSI SULAWESI UTARA (TP)	83,14	99,35	68,97	100	4,41	61,02
72	DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI SUMATERA BARAT (DK)	82,17	99,03	77,28	100	0,97	52,43
73	DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAWA BARAT (TP)	82,08	97	48,41	100	8,48	71,2
74	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROV. D.I. YOGYAKARTA (TP)	81,81	99,36	76,44	100	0,64	51,61
75	DINAS PERKEBUNAN PROVINSI SUMATERA SELATAN (DK)	81,66	98,63	73,19	100	1,37	53,41
76	DINAS PERTANIAN PROVINSI MALUKU (DK)	80,18	100	69,65	100	0	50
77	DINAS PERKEBUNAN PROPINSI SULAWESI UTARA (DK)	78,17	99,68	57,58	100	0,32	50,79
78	DINAS PERKEBUNAN PROV SUMATERA UTARA (TP)	76,76	95,03	48,35	100	1,32	53,3
79	DINAS PERTANIAN PROVINSI MALUKU (TP)	71,62	96,2	47,44	100	-5,8	35,51

## PERTEMUAN MONEV LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN SEMESTER 1 TA 2022

Tanggal 20-22 Juli 2022, di IPB International  
Convention Center



## PERTEMUAN MONEV LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN SEMESTER 2 TA. 2022

Tanggal 14-16 November 2022, di IPB International Convention Center



## PEMBINAAN KARAKTER PEGAWAI LINGKUP DITJEN PERKEBUNAN

Tanggal 13-14 Mei 2022, di Lido Lake Resort Bogor



## PEMBINAAN SDM LINGKUP DITJEN PERKEBUNAN

Tanggal 19-20 November 2022, di Hotel Green Forest Bogor



**Internalisasi Pola**

**Budaya Kerja:**

Fokus,

Responsif,

Kolaboratif



## PERTEMUAN KOORDINASI TIM SATLAK SPI

Tanggal 27-28 Mei 2022, di Hotel  
Ibis Style Bogor



## PENILAIAN MANDIRI MATURITAS SPIP



## PENJAMINAN KUALITAS MATURITAS SPIP



## PERTEMUAN EVALUASI PMPRB DITJEN PERKEBUNAN

Tanggal 20-22 April 2022, di Hotel Amaroossa Royal Bogor



Rapat PMPRB April 2022  
anangsiang, Kec. Bogor Tim., Kota Bogor, Jawa Barat 16143, Indonesia  
-6,60226, 106,80513, 41,7m  
20 Apr 2022 14:18:37



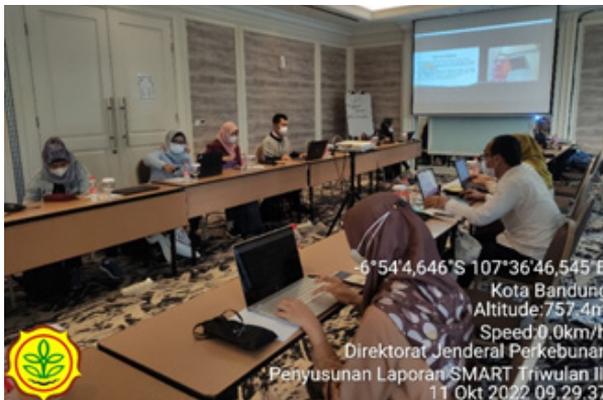
Rapat PMPRB April 2022  
anangsiang, Kec. Bogor Tim., Kota Bogor, Jawa Barat 16143, Indonesia  
-6,60199, 106,805, 285,1m  
22 Apr 2022 09:04:49



Rapat PMPRB April 2022  
anangsiang, Kec. Bogor Tim., Kota Bogor, Jawa Barat 16143, Indonesia  
-6,60194, 106,80506, 289,1m  
22 Apr 2022 09:13:23

## PERTEMUAN PENGISIAN LAPORAN TRIWULAN III PADA APLIKASI SMART

Tanggal 10-12 Oktober 2022, di Hotel Four Points Bandung



## WORKSHOP DAN BIMTEK LAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BIDANG PERKEBUNAN

Tanggal 2 – 4 November 2022, Di Semarang



## PELATIHAN PETUGAS PENILAI USAHA PERKEBUNAN

Tanggal 29 Agustus – 3 September 2022, Di Bogor



## PERTEMUAN NASIONAL EVALUASI PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN

Tanggal 24 – 26 Maret 2022, Di Bandung



## PERTEMUAN KOORDINASI PENYUSUNAN ANGGARAN 2023

Tanggal 12 – 15 September 2022, di Hotel Bigland Bogor



## PERTEMUAN PENYUSUNAN SATUAN BIAYA PEMBANGUNAN PERKEBUNAN TAHUN 2023

Tanggal 15 – 17 Juni 2022, di Hotel Eastparc Yogyakarta





## **Kantor Pusat Kementerian Pertanian**

Jl. Harsono RM No.3 Gedung C,  
Ragunan, Jakarta Selatan 12550

Telp. : (021) 7815380 -4

Fax : (021) 7815486-7815586

Email : [ditjenbun@pertanian.go.id](mailto:ditjenbun@pertanian.go.id)